

LAPORAN TAHUNAN

**Pembangunan Setara dan Berkelanjutan
di Indonesia
Memperkuat Advokasi Internasional INFID**



**Periode
Januari-Desember
Tahun 2008**

LAPORAN NARASI

PERIODE : JANUARI – DESEMBER 2008

I. Introduction

Tahun 2008 merupakan tahun yang pantas disebut sebagai Tahun Ketidakpastian. Di segala bidang kehidupan : sosial, ekonomi, politik dan Hak Asasi Manusia terjadi di semua tingkatan internasional, regional, nasional maupun lokal.

Perubahan situasi tersebut menuntut INFID untuk memberikan respon cepat tanggap (*Quick responds*) sesuai dengan konteks dan momentumnya. Tuntutan situasional ini, mengakibatkan melakukan beberapa perubahan strategi dan melakukan beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan Rencana Kerja Tahunan (Workplan), misalnya menanggapi issue kenaikan BBM, pengesahan UU Pornografi, Krisis Keuangan Global, Serangan Israel terhadap Palestina dan adanya Vonis bebas terhadap Muchdi PR tersangka pembunuh aktivis Munir.

Namun tindakan Respon cepat tanggap yang dilakukan oleh INFID tetap menjalankan Rencana Kerja Tahunan (Workplan) dan tidak terlepas dari kerangka kerja jangka Panjang (logical Frame Work) 2004-2009 dengan Thema : **Pembangunan Setara dan Berkelanjutan di Indonesia, Memperkuat Advokasi Internasional INFID** (*Equality and Sustainable Development in Indonesia, Strengthening INFID's International Advocacy*) yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan demokrasi di tingkat global, nasional dan lokal.

Capaian-capaian kerja INFID menunjukkan bahwa kerja-kerja Advokasi INFID masih on the track, berada dalam jalur rencana dan target advokasi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan INFID selama tahun 2008 dan kedepan akan semakin berat. Tantangan-tantangan terbesar tersebut antara lain : **Pertama**, adalah tantangan yang bersifat eksternal yaitu Situasi ekonomi, politik dan HAM yang semakin tidak menentu serta prioritas masyarakat sipil yang sangat beragam. **Kedua**, adalah tantangan yang bersifat internal yaitu semakin berkurangnya sumber dana dan sumber daya manusia di tingkat sekretariat INFID.

Namun demikian, masih ada peluang dan kekuatan yang dapat didayagunakan untuk menghadapi tantangan. Peluang yang ada

antara lain, 1). adanya ide-ide baru untuk perbaikan dan alternatif arsitektur ekonomi-politik global serta 2). adanya perubahan kepemimpinan di tingkat internasional yang memberi arah baru bagi kemitraan dalam politik dan pertahanan dan 3). semakin menguatnya solidaritas masyarakat sipil ditingkat global, regional dan nasional. Sedangkan kekuatan di tingkat internal yang dapat di daya gunakan adalah ketersediaan sarana dan prasaran untuk mendukung kerja-kerja advokasi serta kultur kerja sama, sinergi dan saling membantu di tingkat staff INFID.

II. Analisis situasi Eksternal

II.1. Situasi Internasional

Catatan peristiwa sepanjang tahun 2008, ditutup dengan tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di tingkat dunia, tragedi pelanggaran HAM terjadi di sepanjang jalur Gaza. Ribuan orang, mengalami luka-luka dan tewas akibat serangan militer Israel terhadap Palestina. Warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, merupakan korban terbanyak dalam peristiwa serangan militer tersebut. Dunia mengecam dan menuntut dihentikannya tindakan brutal militer Israel, namun pemerintah Israel yang didukung oleh Amerika mengabaikan semua bentuk kecaman dan tuntutan tersebut. Bahkan resolusi PBB pun tidak memberi efek apapun kepada Israel. **INFID merespon dengan cepat peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Israel merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida.**

Di bidang ekonomi, dunia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang tidak menentu. Krisis pangan menjadi ancaman dunia, bahkan FAO menyebut sebagai "silent tsunami" yang berpotensi membunuh jutaan umat manusia di muka bumi ini. Harga minyak bumi dan pangan di pasar internasional yang terus membumbung tinggi hingga akhir Juni dan jatuh secara tajam hingga Desember 2008 mengakibatkan semua negara harus mengubah asumsi dalam keuangan negaranya.

Kepanikan negara maju, akibat kegagalan ekonomi dalam negerinya mendorong mereka mulai menerapkan proteksi di tingkat domestik masing-masing. Namun pada saat yang sama negara-negara maju tetap mendesak negara berkembang untuk menghapuskan proteksi dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk investasi asing langsung. Kegagalan perundingan ekonomi tingkat global tahun ini, lebih disebabkan oleh keengganan dunia maju untuk bertindak secara adil terhadap negara miskin dan berkembang. Dunia juga dihadapkan

pada ancaman kembalinya resesi dunia seburuk di tahun 1930. Persoalan krisis pangan, krisis energi, kebangkrutan berbagai perusahaan multinasional serta Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ratusan ribu pekerja baik pekerja formal maupun pekerja migran di sektor domestik dan (terutama) di industri otomotif, manufaktur dan perkebunan terus terjadi. Di beberapa negara, situasi ini telah menimbulkan krisis sosial dan politik.

Gejolak ekonomi dunia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi tingkat global, juga berdampak pada Lembaga Keuangan Internasional. Krisis keuangan, sebagai akibat lanjutan dari krisis legitimasi yang terjadi di tahun 2007, dialami oleh International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB). Akibatnya, lembaga keuangan internasional ini melakukan perubahan peran untuk menjadikan lembaga tersebut lebih berorientasi mencari keuntungan. Sejumlah kebijakan perlindungan (Safeguard Policy) lembaga keuangan Internasional mulai diubah lebih longgar demi memenuhi kebutuhan untuk memperoleh keuntungan.

Sejumlah pertemuan tingkat internasional seperti G8 summit (Jepang, July 2008), High Level Summit on MDGs September 2008 dan G 20 summit (Washington, November 2008) digelar berharap agar pertemuan itu dapat menyelesaikan masalah. Namun sejumlah dokumen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut hanya merupakan rethorika yang sangat panjang tanpa ada solusi praktikal yang konkrit.

Pada saat yang sama, reformasi PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) terus diupayakan. Diskusi di tingkat PBB mulai merespon berbagai pandangan masyarakat sipil tingkat global, terkait dengan upaya penghapusan ketidakadilan global. PBB pun mulai merespon masalah aktual seperti krisis pangan, kecenderungan kegagalan pencapaian MDG (Millenium Development Goal) serta illegitimate Debt (utang yang tidak sah).

Terkait upaya mendorong adanya penyelesaian yang adil terhadap beban utang Luar Negeri, tindakan Presiden Ecuador membentuk Komisi Audit Integral terhadap utang luar negeri, dan menyatakan menolak pembayaran terhadap utang-utang yang sah (illegitimate debt) merupakan inspirasi bagi dunia dan pelaku kampanye penghapusan utang. **INFID mengambil pelajaran dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan pemeriksa Keuangan untuk Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit secara integral terhadap**

utang Luar negeri Indonesia. Namun beberapa pertemuan untuk mengatasi krisis ekonomi dunia dan pertemuan Accra tentang Effectivitas Bantuan (Aid Effectiveness) justru melahirkan kesepakatan untuk melanggengkan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Di tengah kekacauan ekonomi dan politik dunia, perhatian dan harapan yang besar disandarkan pada pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat. Sosok Barack Obama sebagai orang muda, berdarah Afrika-Amerika diharapkan akan melahirkan kebijakan yang lebih baik dibanding pendahulunya, George W Bush yang kerap melahirkan kebijakan destruktif bagi keamanan dan perdamaian dunia.

Di tingkat regional, semangat regionalisme, seperti yang dilakukan oleh ASEAN semakin menguat. Kerja sama dibidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan Keamanan serta Hak Asasi Manusia secara terus menerus dirumuskan dan disempurnakan. Setelah ASEAN Charter diratifikasi seluruh anggota ASEAN, maka mandat pembentukan ASEAN Human Rights Body menjadi ruang yang terbuka bagi proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia di kawasan ini

Kerja sama Selatan-Selatan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan relasi ekonomi yang lebih adil, setara dan saling menguntungkan. Namun demikian di kawasan ini, krisis politik dan konflik internal yang terjadi di Philpina, India, Thailand, Malaysia serta otoriterisme berkelanjutan di Burma juga menjadi faktor penghambatnya terbangunnya kerja sama yang kuat. Disamping itu, konflik antar negara juga semakin meruncing. Peristiwa serangan teroris di Mumbai India (Des 2008), misalnya, berujung dengan meruncingnya konflik antara India dan Pakistan.

II.2. Situasi Nasional

Di tingkat nasional, lembar akhir tahun 2008, ditutup dengan vonis bebas tersangka pembunuh aktivis HAM, Muchdi Pr. Vonis bebas tersebut, merupakan salah satu pertanda sulitnya penegakkan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM, apalagi jika pelakunya merupakan petinggi militer.

Sejumlah momentum penting bersifat kebangsaan diperingati dalam tahun ini. Pada awal hingga pertengahan tahun, diperingati 10 tahun Reformasi dan Jatuhnya Soeharto, 100 tahun Kebangkitan Nasional yang keduanya jatuh pada bulan Mei. Sedangkan pada setengah tahun

kedua, Juli hingga Desember diperingati 63 Tahun Kemerdekaan pada Agustus, 80 tahun Sumpah Pemuda pada Oktober dan 80 Pergerakan Perempuan pada bulan Desember. Momentum lain yang tak kalah penting adalah kematian Soeharto pada Mei 2008 dan hiruk pikuk memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.

Sejumlah kegiatan elemen masyarakat dan pemerintah diarahkan pada evaluasi kemajuan pembangunan, pelaksanaan agenda reformasi, Pemenuhan dan penegakkan Hak Asasi Manusia, perwujudan demokratisasi dan supremasi sipil serta pencapaian kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan. Beberapa tanda-tanda dan peristiwa dapat diklaim sebagai kemajuan demokrasi seperti diselenggarakannya pemilihan Pimpinan Daerah Langsung (Pilkada) di 365 daerah dan pemilihan presiden-wakil presiden (Pilpres) langsung yang relatif berjalan damai. Reformasi sektor pertahanan dan keamanan yang terus berjalan, meski dirasa lambat. serta keterbukaan ruang publik untuk menyampaikan pendapat merupakan beberapa pencapaian positif. Namun tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, merupakan bukti bahwa negara belum berhasil memenuhi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Penyerangan terhadap Hak kebebasan beragama terhadap Ahmadiyah oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa kelompok lain serta disahkannya RUU Anti Pornografi menjadi undang-undang merupakan bukti kemunduran dalam toleransi beragama dan pelanggaran HAM. Sikap aparat kepolisian yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penghentian tindak kekerasan tersebut, merupakan bentuk pembiaran aparat terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Demikian juga SK Bersama (Menteri Agama, Jaksa Agung dan menteri dalam Negeri) tentang Pelarangan terhadap Ahmadiyah, merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Ditengah perayaan Kebangkitan Nasional, masyarakat dihadapkan pada kebijakan kenaikan harga BBM, pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan berlanjutnya proyek konversi minyak tanah ke Gas yang semuanya dibiayai dengan utang. Lebih dari itu, negara ternyata tidak memiliki kemampuan menjamin keterjangkauan secara fisik maupun ekonomi terhadap ketersediaan pangan, pupuk dan BBM serta minyak tanah. Kebijakan ini merupakan bukti ketidak mampuan pemerintah untuk menghadapi tekanan arus global dan kolusi konglomerasi dalam bisnis energi minyak. Protes masyarakat terhadap keputusan pemerintah dalam kebijakan energi yang dihadapi dengan tindak kekerasan oleh aparat keamanan, merupakan bukti bahwa aparat keamanan belum sepenuhnya menunjukkan

keberhasilannya dalam melakukan reformasi dan mengubah wataknya yang militeristik.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, rawan dipolitisir. Rezim berkuasa cenderung beranggapan bahwa kritik kebijakan yang disuarakan oleh berbagai pihak, merupakan politisasi permasalahan untuk menjatuhkannya, menjelang Pemilihan Umum 2009. Kemiskinan, yang riil dialami oleh masyarakat, menjadi komoditas politik, baik oleh rezim berkuasa, maupun oleh elit-elit politik di luar dan di dalam parlemen. Hasilnya, di tengah penderitaan karena kemiskinan, masyarakat hanya melihat drama politik pembelaan terhadap kaum miskin yang dipertontonkan melalui berbagai media massa. Tanpa penyelesaian nyata.

III. Analisis Situasi Internal

Di tingkat sekretariat INFID tetap menjalankan mandatnya sesuai hasil Rapat Umum Anggota (General Assembly Meeting) pada November 2005 yaitu,

- a. mengefektifkan status konsultatif Ecosoc PBB untuk melakukan intervensi tingkat internasional untuk mendorong pemajuan peran negara dalam mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia, terutama untuk implementasi semua instrument internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Revitalisasi peran Anggota
- c. Peningkatan kapasitas anggota INFID untuk melakukan advokasi

sesuai mandat lembaganya dan mendukung advokasi INFID

Disamping itu, INFID tetap melaksanakan program-program advokasi dengan berbasiskan pada riset, pada empat fokus issue yang meliputi:

- 1) Supremasi Sipil, Reformasi Anggaran Militer dan HAM (Khususnya, Hak Sipil dan Politik)
- 2) Kampanye penghapusan Utang, yang saat ini lebih difokuskan pada penghapusan utang tidak sah (illegitimate Debt),
- 3) Penghapusan Kemiskinan, pencapaian MDG dan pemenuhan HAM (Khususnya Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)
- 4) Memperkuat kelembagaan untuk mendukung advokasi di tingkat internasional dan nasional.

Jika dilihat dari jumlah personil yang tersedia dalam sekretariat, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan dan pemenuhan struktur organisasi. Namun karena keterbatasan dana yang pada tahun 2008

ini semakin jauh berkurang, maka keterbatasan tersebut diatasi melalui beberapa strategi, antara lain :

- Bekerja sama dan menggunakan sumberdaya organisasi-organisasi anggota INFID
- Menggunakan jaringan advokasi yang dibentuk INFID bersama organisasi-organisasi anggota INFID dan jejaring kerja
- Membentuk kelompok kerja ditingkat sekretariat INFID
- Melakukan rotasi dan mutasi personil sekretariat dan pebagian peran dalam advokasi.

Sejauh ini berbagai strategi tersebut dapat mengatasi berbagai persoalan keterbatasan internal. Dan INFID tetap menjalankan program serta kegiatan-kegiatannya sesuai rencana kerja tahunan yang telah dirumuskan.

LAPORAN CAPAIAN PROGRAM 2008

■ Capaian program yang diperiksa meliputi:

1. perbaikan di tingkat organisasi (*management result*),
2. perubahan di tingkat konstituen langsung (*enabling result*)
3. perubahan di tingkat masyarakat (*development result*).

I. Capaian Berdasarkan Divisi

I.1. Laporan Divisi Riset dan Publikasi

I.1.1. manajemen result :

- ✓ Riset-riset dilakukan oleh staff sekretariat beserta anggota INFID dan langsung digunakan untuk advokasi, sehingga penguasaan substansi dan penjiwaannya lebih kuat
- ✓ Ketersediaan basis argumen dalam bentuk riset untuk advokasi :

a. Supremasi Sipil dan SSR

- ✓ Penulisan working papers tentang Reformasi Sektor Keamanan, khususnya tentang anggaran militer. (pada tahap finalisasi).
- ✓ Riset tentang Pakta Integritas dan Prinsip anti-penyuapan: berbasis konvensi internasional dan UU nasional (pada tahap finalisasi).
- ✓ Riset tentang kemajuan harmonisasi ICCPR dan UU Indonesia (pada tahap finalisasi).

b. Utang

- ✓ Working papers tentang utang Bank Dunia: the Reconstruction of the Aceh Land Administration System (RALAS), Efisiensi Perkeretaapian, dan PPK.
- ✓ Riset tentang struktur utang Indonesia: literatur, berdasarkan informasi dari Ditjen Pengelolaan Utang, Bappenas, Bank Indonesia dan dari negara kreditor. Riset tentang beban jatuh tempo pembayaran utang 2009-2015 dan beban pencapaian MDG
- ✓ Riset tentangn proyek-proyek ODA Jepang, bekerjasama dengan NINDJA.
- ✓ Riset tentang audit utang dengan perbandingan dengan Filipina dan Ecuador, dan di Indonesia yang dilakukat oleh BPK. (Belum selesai)
- ✓ Riset bersama AFRODAD tentang Aspek Hukum internasional dan nasional Illegitimate Debt, dengan kasus kapal perang Jerman.
- ✓ Riset tentang Utang untuk Privatisasi Air (terbit terbatas)

c. Kemiskinan dan MDG

- ✓ Working paper tentang Goal 8 MDGs, global partnership
- ✓ Update/revisi Annual Citizens Report on MDGs Achievements.
- ✓ Updating 2007 MDGs Citizens Report untuk tujuan-tujuan tertentu, yang diintegrasikan dengan hak EKOSOB.
- ✓ Monitoring pencapaian MDGs sebagai upaya implementasi ICESCR, di beberapa daerah: Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi (baru tahap awal)
- ✓ Riset tentang implementasi ICESCR, untuk dijadikan sebagai shadow report; kerjasama dengan ELSAM dan RWI
- ✓ Terpeliharanya kerja sama di bidang riset dan pengembangan pengetahuan dengan Universitas, Pakar dan Staff ahli dari lembaga negara.
- ✓ Sekretariat menangkap kebutuhan anggota terhadap informasi dasar tentang Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Sekretariat menerbitkan Fact Sheet tentang Jaminan Hak Atas Pangan Yang Layak (dengan basis hukum Nasional dan instrumen Internasional)
- ✓ Publikasi buku tentang anggaran militer (masih dalam editing process).
- ✓ Publikasi Working paper tentang utang dan hibah melalui Bank Dunia:
 - RALAS (Recovery of Aceh Land Administration)
 - Kecamatan Development Project di Central Sulawesi
 - Railway Efficiency Project
 - Proyek yang didukung USAID di Aceh Barat
- ✓ Publikasi Working paper tentang utang dan hibah melalui Bank Dunia
- ✓ Working Paper INFID diterbitkan dalam dua versi bahasa (Indonesia dan Inggris)
- ✓ Meningkatkan jumlah informasi yang disampaikan kepada anggota dan jejaring kerja : up date issue dan aktifitas di PBB, Kegiatan jejaring Internasional Terbangunnya Audio Visual (film durasi pendek) sebanyak 6 film dan Video dokumenter tentang Kapal Perang Bekas Jerman (masih dalam proses)
- ✓ Newsletter dan Short News Overview (SNOs)

I.1.2. Enabling result

- ✓ Meningkatnya jaringan dalam security sector reform
- ✓ Adanya keterlibatan anggota dalam riset –riset INFID
- ✓ Digunakannya hasil riset INFID untuk acuan monitoring proyek utang di wilayah.
- ✓ Digunakan informasi-informasi INFID untuk advokasi di wilayah

I.1.3. Development result

- ✓ Riset yang berdasarkan kasus lebih mendekatkan Infid ke masyarakat, sehingga masyarakat ada pemahaman langsung dari advokasi Infid.

I.1. Laporan Divisi Advokasi

I.2.1. Manajemen result

- ✓ Penyelenggaraan pelatihan riset sebanyak dua angkatan untuk memperkuat hasil riset yang akan digunakan sebagai basis advokasi.
- ✓ Adanya pembaharuan strategi advokasi untuk membuka peluang pelibatan langsung bagi anggota, pakar, politisi dan masyarakat umum dalam
- ✓ Advokasi di tingkat Nasional lebih diarahkan pada kritik dan intervensi perubahan kebijakan publik (peraturan perundangan dan kebijakan administratif)
- ✓ Mendorong percepatan reformasi Sektor Keamanan dan perpolisian masyarakat
- ✓ Advokasi Internasional dilakukan dengan:
 - lebih mempekuat intervensi dalam pertemuan PBB (pengiriman Written statement, Oral intervention dan general debat)
 - Memperkuat jejaring kerja internasional secara regional di tingkat ASEAN, Asia dan Pacifik dan Eropa
 - Memperkuat intervensi di tingkat regional khususnya ASEAN
 - Mengaktifkan anggota untuk terlibat langsung dalam advokasi Internasional (khususnya di tingkat PBB) untuk issue yang menjadi bidang garap anggota
- ✓ Terlibat aktif dalam kampanye global yang dilakukan langsung dalam pertemuan internasional ataupun menyelenggarakan kampanye di tingkat nasional dalam rangka Global week action.
- ✓ Adanya perubahan situasi ekonomi (krisis Ekonomi) di tingkat global yang berdampak pada tingkat nasional membuat sekretariat harus melakukan respon situasi aktual di tingkat Internasional dan Nasional
 - Di Tingkat Internasional, bergabung dengan kelompok masyarakat sipil mengkritisi arsitektur dan struktur globalisasi ekonomi serta mengkritisi peran dan relevansi lembaga keuangan Internasional (World bank, IMF dan ADB)
 - Di Tingkat Nasional, mengkritisi kebijakan pemerintah dalam memberikan proteksi pemodal dengan menggunakan dana APBN dan kebijakan dalam penanganan krisis. Membangun diskusi-diskusi di tingkat anggota dan jejaring kerja yang memunculkan ide mendorong INFID untuk

menyuarakan alternatif Pembangunan terutama di bidang politik ekonomi

I.2.2. Enabling result

- ✓ Keterlibatan langsung anggota dalam advokasi penghapusan Utang kapal Jerman
- ✓ Beberapa anggota melakukan advokasi di tingkat internasional dengan menggunakan status akreditasi ECOSOC yang dimiliki INFID.
- ✓ Sebanyak 63 anggota terlatih dalam riset untuk advokasi (presentasi keterlibatan perempuan 11% dalam pelatihan angkatan I dan 28% dalam pelatihan angkatan II)
- ✓ Terbangunnya komunitas Riset INFID dan terpeliharanya komunikasi antar anggota komunitas Riset melalui Mailing-list komunitas Riset
- ✓ Komunitas Riset menggunakan Mailing-list untuk saling mendukung advokasi di wilayah anggota
- ✓ Anggota dan jejaring INFID memahami sebab dan akibat krisis ekonomi global dari diskusi-diskusi yang diselenggarakan INFID membahas krisis keuangan (terutama investasi di sektor keuangan/saham) global dan dampaknya pada krisis di tingkat nasional.
- ✓ Anggota INFID mendukung dan memutuskan dalam General Assembly agar INFID (sekretariat dan anggota) melaksanakan mandat mempromosikan alternatif pembangunan
- ✓ Sudah ada sekitar 40-an peneliti yang siap untuk melakukan penelitian untuk advokasi.

I.2.3. Development result

Tingkat Lokal

- ✓ pemerintah daerah mengintegrasikan MDG dan penghapusan kemiskinan dalam dokumen Perencanaannya
- ✓ Beberapa daerah (Solo, Sulawesi) menolak utang PNPM

Tingkat nasional

- ✓ Pembaharuan strategi pelibatan langsung masyarakat dan pengambil keputusan dalam advokasi sekretariat INFID menghasilkan:
 - Adanya dukungan Petisi yang dibuat INFID
 - DPR merencanakan membuat Panitia kerja Penghapusan Utang kapal perang Jerman.

- Anggota DPR dan ekonom menyuarkan penolakan terhadap kebijakan utang pemerintah, dalam beberapa talk show yang diselenggarakan INFID dengan melibatkan DPR
 - Sejumlah 6 Fraksi dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan RAPBN 2009 menyuarkan penolakan terhadap kebijakan utang pemerintah
- ✓ Laporan Warga tentang Capaian MDGs menjadi perhatian pemerintah.
 - ✓ Kerangka lebih besar tentang Audit Utang telah dibahas dengan pemerintah dan DPR, dan sudah mulai dilaksanakan secara parsial oleh BPK.
 - ✓ Debts swap untuk Utang dari Australia sudah mulai dibahas di dalam pemerintah.
 - ✓ Working Paper tentang PPK sudah dibahas dalam diskusi-diskusi lembaga-lembaga pemerintah yang mengimplementasikan PNPM.
 - ✓ Pertimbangan gender dalam negosiasi internasional berkaitan dengan pembiayaan pembangunan sudah diadopsi pemerintah (masih menunggu integrasi dalam kebijakan).
 - ✓ Audit BPK telah dimulai: 60 proyek sebagai awal dan hasil laporan dipublikasikan melalui media massa serta dapat diakses oleh publik
 - ✓ KPK telah memutuskan untuk melakukan audit utang pada tahun 2009.
 - ✓ Dialog intensif masyarakat sipil dan Polri untuk pendalaman konseptualisasi Polmas.
 - ✓ Penghentian bisnis militer sudah diberi tenggat waktu melalui KEPPRES.
 - ✓ Ada perhatian khusus dari pemerintah (MENEG PP dan Bappenas) tentang dampak utang tertentu pada perempuan.
 - ✓ Diterbitkannya SKEP KAPOLRI untuk mempercepat perpolisian masyarakat

Tingkat Internasional

- ✓ Strategi menggunakan instrument hukum internasional dan nasional dalam advokasi Internasional diikuti oleh jejaring internasional INFID termasuk mengkaji ulang pemahaman tentang Pacta sunt servanda (perjanjian antar negara mengikat negara kedua belah pihak dan harus dilaksanakan), pengembangan ulang definisi "Itikad Baik" (Good faith), invalidity dan pembuktian pelanggaran hukum internasional.

- ✓ Perspektif Legal tentang Illegitimate Debts yang diinisiasi INFID dan AFRODAD telah mendapat respons positif dan luas dari pakar-pakar hukum internasional.
- ✓ Studi INFID tentang illegitimacy dari utang kapal-kapal perang bekas Jerman telah ditindak-lanjuti dengan studi khusus oleh pakar hukum internasional dari Universitas Vienna, Austria, dan telah diperdebatkan dalam seminar khusus di Bank Dunia, Washington.
- ✓ Kasus-kasus tentang aid (in-)effectiveness dari Indonesia telah dibahas dalam berbagai forum internasional: Accra, UNDP New York, DCF – ECOSOC Secretariat, dll.
- ✓ Sudah ada tanggapan awal dan informal dari pemerintah Jerman tentang utang untuk pembelian kapal-kapal perang bekas Jerman dalam forum-forum internasional (World Bank Annual Meeting dan Doha Conference)
- ✓ Respons awal dari pemerintah Norwegia tentang beberapa utang dari Norwegia yang dicurigai illegitimate.
- ✓ Komitmen awal dari pemerintah Australia untuk debt swap for health. namun masih harus ditindak lanjutinya mempersamakan persepsi dan pemilihan utang yang akan di-swap

I.2. Laporan Pengembangan institusional.

I.3.2. Penguatan kelembagaan yang diupayakan :

- ✓ Mewujudkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Mekanisme pengambilan keputusan mulai berjalan sebagaimana mestinya.
- ✓ Terselenggaranya Rapat Umum Anggota (General Assembly) untuk pertanggung jawaban program, perumusan program 3 tahun ke depan dan penggantian kepengurusan
- ✓ Teringrasikannya Pengarus Utamaan Gender dalam Peraturan organisasi dan terwujudnya keterwakilan minimal 30% Perempuan dalam lembaga perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat organisasi
- ✓ Penguatan kerja advokasi melalui efektifitas sistem manajemen dan operasional
- ✓ Mewujudkan profesional staf
- ✓ Ketersediaan dana pendukung untuk kerja-kerja yang ada

I.3.1.2. Manajemen result

- ✓ Keputusan yang bersifat strategis dan operasional yang terselenggara karena adanya dan berjalannya mekanisme pengambilan keputusan
- ✓ Adanya keputusan yang cepat dan efektif untuk program, lebih karena adanya proses PME secara berkala. Dan monitoring setiap bulan agak efektif. PME setiap tiga bulan sekali
- ✓ Ketersediaan dana masih harus fund rising dan pengelolaan keuangan untuk dua tahun berikutnya
- ✓ Meningkatnya staf dengan mekanisme pendelegasian wewenang yang jelas ke staf, mentoring dan pemberian kepercayaan yang besar ke staf
- ✓ Terbukanya kesempatan anggota INFID untuk mengikuti kegiatan di berbagai isu dan monitoring kinerja INFID
- ✓ Ketersediaan perangkat dan sistem manajemen informasi yang memungkinkan staf Infid melakukan desimnasi informasi dan sosialisasi isu dengan jangkauan luas
- ✓ Anggota merasakan adanya pembelaan terhadap kepentingan mereka dan adanya rasa memiliki anggota terhadap INFID
- ✓ Fasilitasi anggota dan jejaring yang akan datang melakukan advokasi di tingkat nasional (ke DPR dan pemerintah) dan melakukan advokasi di tingkat internasional dengan menggunakan akreditasi INFID.

Tahun 2008 adalah penguatan kelembagaan maupun kultur kerja lembaga dan penyempurnaan perangkat peraturan organisasi

- ✓ Terpeliharanya kultur kerja sama dan solidaritas, nilai-nilai dan semangat yang telah dibangun sejak tahun 2006 yaitu refitalisasi peran di lingkungan kerja sekretariat INFID dan tampilnya anggota INFID sebagai pelaku utama dalam advokasi issue bersama yang telah disepakati
- ✓ Menyelenggarakan General Assembly tepat waktu, diterima pertanggung jawaban laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus periode 2005-2008, adanya mandat untuk peran, strategi dan program untuk tahun 2008-2011, terpilihnya anggota Dewan Pengurus (managing Board) dan Dewan Pengawas (Supervisory Board) dan Dewan Penasihat (Advisory Board)
- ✓ Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar yaitu memastikan jumlah perempuan terpilih dalam struktur kepemimpinan (Dewan Pengurus dan dewan Pengawas) lebih dari 30%

I. Capaian INFID di tahun 2008 Berdasarkan Isu

II.1. Utang

II.1.1. Management Result:

- ✓ Memperkuat strategi baru untuk advokasi utang dengan menggunakan basis hukum nasional dan internasional.
- ✓ INFID memiliki argumentasi hukum untuk menggugat kasus proyek Kapal perang Jerman.
- ✓ Menggunakan kasus sebagai strategi untuk mengadvokasi
- ✓ Mampu melakukan kerjasama dengan masyarakat Jerman untuk mengadvokasi proyek kapal perang Jerman
- ✓ INFID dapat menyelesaikan riset dan working paper hasil riset sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat untuk isu Utang

II.1.2. Enabling Result:

- ✓ Strategi menggunakan instrument hukum internasional dan nasional dalam advokasi Internasional diikuti oleh jejaring internasional INFID termasuk mengkaji ulang pemahaman tentang Pacta sunt servanda (perjanjian antar negara mengikat negara kedua belah pihak dan harus dilaksanakan), pengembangan ulang definisi "Itikad Baik" (Good faith), invalidity dan pembuktian pelanggaran hukum internasional.
- ✓ Masyarakat semakin banyak mendiskusikan Pasal 11 ayat (2) UUD'45, Semua Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan keuangan Negara dan berakibat pada perubahan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan DPR.
- ✓ Anggota INFID dapat mengetahui konstitusi Indonesia yang mengatur tentang illegitimate debt.
- ✓ Anggota INFID dapat melihat dampak utang di wilayah mereka
- ✓ Anggota INFID dapat mengidentifikasi penyusunan APBD yang menggunakan utang dan peran DPRD mereka
- ✓ Anggota memahami perjanjian internasional Vienna Convention tahun 86, yang mengatur kewajiban lembaga keuangan internasional dan negara dalam hukum internasional. Sehingga bisa dijadikan dasar untuk menyatakan utang illegitimate atau tidak.

- ✓ Adanya dukungan langsung atas advokasi utang dari NGO internasional dan masyarakat Indonesia yang ada di tingkat internasional.
- ✓ Lawyers Internasional (pakar utang) melakukan pembahasan mengenai kasus utang di Indonesia yaitu utang kapal Perang Jerman, ADB, Worldbank, dll. INFID diundang khusus dan memberikan presentasi mengenai hal tersebut.
- ✓ Perspektif Legal tentang Illegitimate Debts yang diinisiasi INFID dan AFRODAD telah mendapat respons positif dan luas dari pakar-pakar hukum internasional.

II.1.3. Development Result

- ✓ Studi INFID tentang illegitimacy dari utang kapal-kapal perang bekas Jerman telah ditindak-lanjuti dengan studi khusus oleh pakar hukum internasional dari Universitas Vienna, Austria, dan telah diperdebatkan dalam seminar khusus di Bank Dunia, Washington.
- ✓ Kasus-kasus tentang aid (in-)effectiveness dari Indonesia telah dibahas dalam berbagai forum internasional: Accra, UNDP New York, DCF – ECOSOC Secretariat, dll.
- ✓ Sudah ada tanggapan awal dan informal dari pemerintah Jerman tentang utang untuk pembelian kapal-kapal perang bekas Jerman dalam forum-forum internasional (World Bank Annual Meeting dan Doha Conference)
- ✓ Respons awal dari pemerintah Norwegia tentang beberapa utang dari Norwegia yang dicurigai illegitimate.
- ✓ Komitmen awal dari pemerintah Australia untuk debt swap for health. namun masih harus ditindak lanjutinya untuk mempersamakan persepsi dan pemilihan utang yang akan di-swap
- ✓ DPR merencanakan membuat Panitia kerja Penghapusan Utang kapal perang Jerman.
- ✓ Anggota DPR dan ekonom menyuarakan penolakan terhadap kebijakan utang pemerintah, dalam beberapa talk show yang diselenggarakan INFID dengan melibatkan DPR
- ✓ Sejumlah 6 Fraksi dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan RAPBN 2009 menyuarakan penolakan terhadap kebijakan utang pemerintah
- ✓ BPK (Badan Pemeriksa Keuangan yang berfungsi sebagai Badan Audit Nasional Keuangan Negara) melakukan Audit terhadap perjanjian utang dan pelaksanaan utang dan mengumumkan hasil melalui media massa dan website

BPK tentang temuan-temuannya seperti: 1) hilangnya 538 dokumen perjanjian utang, 2) tidak efektifnya penggunaan dana utang, 3) adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan. Sehingga masyarakat luas mengetahui problem utang dan terdorong untuk ikut memonitor proyek utang

- ✓ KPK (Komisi Penghapusan Korupsi) melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian utang, penggunaan dana utang, beban kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat utang serta indikasi tindakan pelanggaran Hukum, temuan-temuan KPK diumumkan melalui media massa dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

II.1. Poverty dan MDGs

II.2.1. Management Result

- ✓ INFID memperkuat pemahaman bahwa kemiskinan dalam kerangka akibat pemiskinan, yang melakukan adalah lembaga ekonomi internasional.
- ✓ INFID mampu mengkampanyekan MDGs melalui berbagai media (leaflet, poster, film, mailist, penerbitan buku laporan pencapaian MDG) kepada anggota dan jaringan
- ✓ Peringatan Dini ancaman kegagalan pencapaian MDG dan penghapusan kemiskinan sebagai akibat dari kebijakan pro pertumbuhan, liberalisasi perdagangan kebutuhan dasar dan beban pembayaran utang tahun 2009-2015 menjadi diskusi di tingkat media, DPR dan pemerintah dan oleh pemerintah mengakui situasi kritis tersebut.

II.2.2. Enabling Result

- ✓ Anggota dan jaringan INFID ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menjadi alat pemiskinan
- ✓ NGO yang melakukan advokasi anggaran menggunakan MDGs dan hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagai alat advokasi.
- ✓ Anggota di Palu, NTT, dan NTB mampu melakukan penyadaran pada pemerintah daerahnya mengenai mengintegrasikan MDGs dalam kebijakan dan anggaran daerah.

- ✓ Anggota terdorong untuk mempelajari MDGs dan mampu melakukan advokasi kepada pemerintah daerahnya.
- ✓ Anggota memberikan perhatian lebih baik terhadap kebijakan dan kasus-kasus pelanggaran Hak Ekonomi sosial dan budaya (hak atas pangan pangan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, dll) sebagai pelanggaran HAM

II.2.3. Development Result

- ✓ Pemerintah melakukan perubahan laporan, dalam proses mereka melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah; dalam substansi: beberapa hal yang dikritik oleh INFID misalnya mengenai updating Angka Kematian Ibu dikutip oleh pemerintah, dan Goal 8 (Global Partnership) sangat kentara mengutip dari INFID.
- ✓ Pemerintah dan komnas HAM melakukan konsultasi dengan masyarakat sipil dalam pelaporan UPR (UN)
- ✓ Pemerintah (Bappenas) mengeluarkan perhitungan kebutuhan pembiayaan yang harus disediakan untuk mencapai setiap target MDG sampai dengan tahun 2015. pembuatan perhitungan kebutuhan pembiayaan ini didorong oleh INFID sejak awal tahun 2006

II.2. Supremasi Sipil

II.3.1. Management Result

- ✓ INFID mampu mempertahankan perannya sebagai fasilitator anggotanya yang bekerja di bidang HAM dan SSR untuk sama-sama melakukan advokasi Supremasi Sipil
- ✓ INFID mampu mengidentifikasi kerja-kerja anggotanya di bidang HAM dan SSR, serta melakukan penguatan untuk mengisi kekosongannya.
- ✓ INFID mampu melakukan kajian terhadap struktur program dan anggaran pertahanan security sector.
- ✓ INFID mampu melakukan kajian alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) dengan mengambil angle reformasi ekonomi sektor pertahanan
- ✓ INFID mampu menjadi pembentuk opini untuk isu security sector reform dan evaluasi 10 tahun pelaksanaan security sector reform

- ✓ INFID mampu melakukan konsultasi dengan anggota-anggota yang bergerak dalam bidang SSR saat mengeluarkan pendapat mengenai isu anggaran pertahanan.
- ✓ INFID mampu menggunakan kredit ekspor yang dianggap meningkatkan utang dan penuh dengan korupsi di militer.
- ✓ INFID mampu menggalang anggotanya untuk memonitor kerjasama pertahanan tingkat Internasional
- ✓ INFID mampu mengusulkan kriteria dalam rekrutment KAPOLRI dan meminta komitmen KAPOLRI terpilih dalam melaksanakan agenda SSR
- ✓ INFID mampu mengusulkan adanya screening test berbasis pelanggaran HAM terhadap anggota TNI yang dikirim berlatih ke Amerika.
- ✓ INFID mampu menggalang kerja sama dengan anggotanya (dalam aspek substansial maupun finansial) untuk menyelenggarakan training SSR
- ✓ INFID dan anggota menggagas perspektif keadilan gender dalam advokasi SSR termasuk di dalamnya mengupayakan adanya peserta perempuan dalam training SSR

II.3.1. Enabling Result

- ✓ Anggota INFID yang bekerja di bidang HAM dan security sector reform mampu bekerjasama melalui isu Supremasi Sipil.
- ✓ Anggota dan jaringan INFID mulai melakukan monitoring terhadap kredit ekspor
- ✓ Anggota mampu melakukan monitoring atas kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain
- ✓ Meningkatnya jaringan dan anggota yang memahami dan mau terlibat dalam SSR
- ✓ Ada perubahan sikap di tingkat anggota yang mengubah pandangannya dari menolak peningkatan anggaran sektor pertahanan, menjadi menyetujui dengan pengawasan dari otoritas masyarakat sipil.
- ✓ Anggota dan jaringan INFID mampu memiliki pemahaman yang lebih kuat dan amunisi dalam melakukan advokasi supremasi sipil.
- ✓ Anggota dan jaringan mampu membuka dialog dengan pembuat kebijakan di sektor pertahanan
- ✓ Sejumlah 30 orang anggota dan jejaring kerja menjadi penerima manfaat penyelenggaraan training SSR (jika

dihitung sejak pelatihan tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 : sejumlah 120 menjadi penerima manfaat training SSR)

Catatan ;

Masih perlu dipikirkan mekanisme dan perangkat monitoring dan evaluasi terhadap peserta training SSR dan pelibatannya dalam advokasi SSR di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah

II.3.2. Development Result

- ✓ Pemerintah mulai membuka peluang kerjasama dengan berbagai negara untuk sektor pertahanan, sehingga tidak bergantung hanya pada Amerika.
- ✓ Adanya kebijakan satu pintu dalam pengadaan alutsista berdasarkan hasil penelitian INFID.
- ✓ Adanya kebijakan revitalisasi industri strategis pertahanan, sebagai ganti dari fasilitas kredit ekspor.

II. Institutional Development

III.1. Enabling Result

- ✓ Anggota memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi dan mengusulkan program terhadap INFID, termasuk di dalamnya dalam memonitor dan memberikan kritik terhadap sekretariat
- ✓ Anggota memahami isu yang diadvokasi INFID
- ✓ Anggota merasakan adanya dukungan INFID terhadap isu mereka

III.2. Management Result

- ✓ INFID mampu melakukan pengambilan keputusan secara efektif dengan berjalannya mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan
- ✓ INFID mampu membentuk Tim Advokasi yang handal dan diakui kredibilitasnya
- ✓ Adanya keputusan-keputusan organisasi yang ideal dan bersifat strategis, maupun keputusan yang bersifat operasional yang dihasilkan mekanisme pengambilan keputusan
- ✓ INFID mampu melakukan PME secara berkala yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk program secara efektif
- ✓ INFID mampu menyelenggarakan Conference dan GA tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam General assembly 2005.
- ✓ Tersedianya dana untuk melaksanakan program 2008.
- ✓ INFID mampu melakukan peningkatan kapasitas staf melalui berbagai program capacity building. Capacity building juga diikuti oleh anggota INFID dan anggota Board.
- ✓ INFID memiliki sistem manajemen informasi dan komunikasi yang memungkinkan staf INFID melakukan diseminasi informasi dan sosialisasi isu INFID dalam jangkauan yang luas

LAMPIRAN

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

I. Division :Research and Publication

I.1. Main activities : Research

I.1.1. Supremasi Sipil, HAM dan reformasi Sektor keamanan

- ✓ Developing working papers on Security Sector Reform (SSR) for Military Budget, Riset ini merupakan riset pustaka dan dokumen kebijakan, masih masih dalam proses pengerjaan sampai pada tahap pengumpulan kebijakan dan penentuan metode analisis kebijakan
- ✓ Research on the Integrity Pact and anti bribery Principles, merupakan riset dokument kebijakan nasional dan internasional, sedang dalam proses pengerjaan untuk melihat pengintegrasian pakta integritas ke dalam kebijakan nasional, khususnya dalam pengadaan alat utama senjata pertahanan (alusista)
- ✓ Research Harmonisation between International Covenan on Civil and Political Rights and Indonesian Law, riset ini bertujuan untuk melihat perkembangan harmonisasi peraturan perundangan, dalam proses pengembangan ToR (*Term of Reference*) . Riset ini akan digabungkan dengan kegiatan advokasi RAN HAM.
- ✓ Finalisasi Riset tentang Bisnis Militer dan masalah Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan (Studi Kasus Kalimantan Timur). Penelitian ini bekerja sama dengan PADI dan CEACOS Universitas Indonesia. Finalisasi penelitian ini menjadi prioritas INFID untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia yang sekarang sedang menyusun rancangan undang-undang tentang Pengelolaan Perbatasan.

I.1.2. Debt

- ✓ Developing working papers on Debt: Penyusunan working paper berdasarkan riset proyek-proyek yang didanai oleh Word Bank yang termasuk contoh kasus Illegitimate Debt, yaitu : Researching of the World Bank-funded Projects are Reconstruction of the Aceh Land Administration System

(RALAS), Railway Efficiency Project, Kecamatan Development Project (PPK) → the research is about debt and also illegitimate debt.

- ✓ Research on Indonesia Debt Structure: merupakan riset pustaka berdasarkan informasi dari debt management Office, Bappenas dan Bank Indonesia. Hasil riset ini tidak dipublikasikan, tetapi sekaligus diintegrasikan dalam strategi advokasi.
- ✓ Research on Japan ODA projects : Dilakukan oleh NINDJA bersama anggota INFID di daerah tempat proyek-proyek utang Jepang dilakukan.
- ✓ Research on the concept on illegitimate debt : World Bank-funded Projects are Reconstruction of the Aceh Land Administration System (RALAS), Railway Efficiency Project, Kecamatan Development Project (PPK)
- ✓ Research on the concept of debt audit and debt management office (to advocate on the draft of bill on Foreign Loan and grant (RUUPHLN), karena pembahasan RUUPHLN tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional, maka riset debt audit dilakukan dengan melihat perbandingan praktek Audit Utang di Philipina dan Equador serta Praktek Audit Utang di Indonesia yang dilakukan oleh BPK dan peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan badan audit. Hasil riset digunakan untuk materi Workshop debt audit yang diselenggarakan oleh INFID dengan melibatkan BPK, KPK, Departemen Keuangan, Bappenas dan anggota DPR
- ✓ Riset tentang Trend kerja sama Internasional dalam pemberian Bantuan Teknis Resmi -ODA (Official Development Assistant) di tingkat nasional dan Internasional dan dampaknya bagi Indonesia. Riset ini digunakan sebagai perangkat lobby dan kampanye dalam Pertemuan G8 di Hokaido, Jepang.
- ✓ Riset Data (Desk Research) tentang Korelasi beban pembayaran Utang yang jatuh tempo pada tahun 2009-2015 dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan MDG. Riset pendek ini digunakan untuk mendukung kampanye MDG High Level event yang diselenggarakan pada September dan kampanye Poverty Day pada Oktober 2008.
- ✓ Riset Utang tidak sah (Illegitimate debt) tentang proyek pembangunan jalan oleh USAID di Aceh. Riset ini digunakan untuk lobby pada pertemuan OECD

- ✓ Riset Kebijakan untuk Pelaksanaan Audit Utang Luar Negeri. Riset ini merupakan analisis peraturan perundang-undangan 1) UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 2) UU tentang Pemeriksaan Keuangan 3) UU tentang Keuangan Negara dan 4) UU tentang Korupsi. Riset ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang cakupan keuangan Negara, kewenangan BPK dan cakupan pemeriksaan keuangan (Audit) dan Kewenangan DPR. Untuk menyusun strategi lobby dan kampanye mendorong dilakukan Audit secara komprehensif terhadap Utang Luar Negeri.

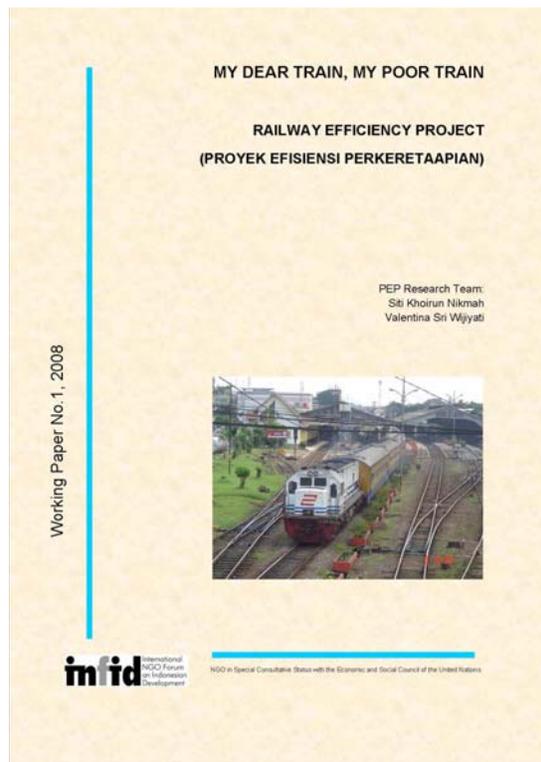
I.1.2. MDG

- ✓ Developing working papers on Millenium Development Goals (MDGs), *Menuliskan laporan goal 8 MDGs tentang global partnership*
- ✓ Formulate the research design and framework for MDGs research (Citizen Report), *kegiatan ini tidak dilanjutkan karena anggota menyepakati format laporan yang digunakan pada penulisan laporan MDG tahun 2007*
- ✓ Monitoring Research on MDGs achievements (Citizen Report updated) on selected goals
 - Kegiatan riset ini diintegrasikan dengan riset monitoring implementasi Hak Econosmi Sosial Budaya.
- ✓ Monitoring Research on the implementation of International Covenan on Ecosoc rights in National Level (contribute for initial report and shadow report ICESCR)
 - Kegiatan ini telah dilaksanakan, dalam proses persiapan monitoring. Persiapan dilakukan sejak Februari 2008, merupakan kerja sama INFID – ELSAM dan WRI. Sampai dengan Juni, persiapan sampai pada tahap ; penentuan Tim Inti, Fokus Area yang akan dimonitor dan metode monitoring yang disepakati.
- ✓ Monitoring Research on MDGs achievements (citizen report) on selected goals including the monitoring on the implementation of International Covenan on Ecosoc rights in selected area (Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi), *sedang dilakukan direncanakan diintegrasikan dengan riset monitoring implementasi ICESCR.*

I.1. Main activities: Publication, Documentation, and Information

I.2.1. *Publication and Documentation*

- ✓ Publishing research result and INFID Forum Result:
 - Penerbitan buku tentang Anggaran Militer “off Budget” masih dalam editing
 - Right now, there are three working papers or research results have been already published: RALAS (written by Abdul Jalil, Delima Silalhi, GJA, Sri Khairil



Tarigan, Jufriadi and Darmawan) , PPK (written by Dahniar and Daniel Lasimpo), Railway Efficiency Project (written by Nikmah and Valentina Sri Wijiyati). These Researches have graduated from INFID's Training of Researcher did during January – February 2008. This papers are also published in INFID website, so public can access it easily.

- ✓ Publikasi written statement INFID yang disampaikan kepada Dewan HAM , melalui Website INFID, meliputi :
- ✓ **Written statement** to *The Human Right Council UN, Seventh session : The Situation of Human Rights Defenders in Indonesi*. . Pernyataan tertulis pada Sidang Ke Tujuh Dewan Hak Asasi Manusia PBB: Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia (Dikirimkan oleh Imparsial, HRWG, INFID pada 20 Februari 2008 dan diterbitkan oleh PBB pada 15 Maret 2008)
- ✓ *Written statement to The Human Right Council UN, Seventh session : Civil and Political Rights: Freedom of Religions and Beliefs*. Pernyataan tertulis pada Sidang Ke

Tujuh Dewan Hak Asasi Manusia PBB: Hak Sipil dan Politik : Hak Kebebasan Beragama dan Kepercayaan. (Dikirimkan oleh Human Rights Working Group Indonesia, Alliance of Freedom of Religions and Beliefs, Setara Institute and Jakarta Branch of Legal Aid Foundation, INFID pada 20 februari 2008 dan diterbitkan oleh PBB pada 14 Maret 2008)

- ✓ Cetak buku Laporan masyarakat Sipil tentang pencapaian MDGs 2007, dan distribusi kepada anggota dan Jaringan INFID serta institusi target advokasi.
- ✓ Visualizing research result (Ex Germany Army Vehicle)
- ✓ Pembuatan Video tentang pembelian kapal Jerman, masih dalam proses pelaksanaan. Kegiatan ini dijadwalkan selesai dalam semester pertama 2008. Namun karena kesulitan dalam mewawancarai aktor utamanya : Habibie, maka penyelesaian pembuatan film mundur dari jadwal yang ditentukan.
- ✓ Base Data on Civilian Supremacy, Debt, and MDGs, masih dalam proses. Penyusunan data disesuaikan dengan kebutuhan riset INFID. Beberapa data yang telah diperoleh telah dimasukkan dalam Website INFID, tetapi masih dalam bahasa Indonesia dan belum terstruktur dengan rapi.
- ✓ Library Collection processing, merupakan kegiatan rutin yang masih berjalan.
- ✓ Subscription of Indonesia and foreign newspaper and magazine, merupakan kegiatan rutin yang terus berjalan.
- ✓ Publishing newsletter, SNO, secretariat update, Koran Berita Politik, Regular Information Survey: newsletter and Koran Berita Rakyat berubah menjadi Jurnal INFID, diterbitkan pada Juni 2008, membahas Laporan utama tentang 10 tahun kejatuhan Soeharto. Selama semester I -2008, diterbitkan sebanyak 8 SNO (sejak bulan Februari sampai Juli). SNO direncanakan terbit setiap 2 minggu sekali, namun karena staff yang bertanggung jawab di bidang informasi juga terlibat dalam kegiatan riset Utang, dan mengikuti program peningkatan kapasitas, maka SNO diterbitkan minimal satu kali sebulan.
- ✓ Book publishing: ADB Toolkits and Grass Root Guide to The World Bank. Grass Root Guide to The World Bank telah diterbitkan oleh BIC Indonesia, dimana staf BIC adalah mantan staff INFID. Untuk menghindari duplikasi maka ADB toolkit yang direncanakan diterbitkan INFID, tidak jadi diterbitkan.

- ✓ Update website content Up date dilakukan setiap hari, memuat kegiatan dan Issue-issue yang terkait dengan advokasi INFID, juga dimasukkan kegiatan advokasi anggota INFID sepanjang ada kiriman informasi dari anggota.
- ✓ Books purchasing berdasarakan kebutuhan riset, advokasi dan peningkatan kapasitas/pengetahuan staff.

1.2.2. Information Technology

- ✓ website maintenance : dilakukan pemeliharaan dan perbaikan link data-data website yang tidak dapat diakses.
- ✓ Upload data base dilakukan melalui penambahan isi website baik berita, kalender kegiatan juga upload terbitan-terbitan INFID : working paper, SNO factsheet, dll.
- ✓ Update software original: Anti virus, Winroute Firewell, LAN cable, SMS Engine dilakukan dengan update antivirus setiap hari baik di client maupun di server.
- ✓ Mirror server : Pembuatan mirror di New york agar dapat mempermudah akses di luar Indonesia
- ✓ Building Audio Visual: dilakukan melalui pembuatan Film pendek durasi 10-15 menit untuk keperluan pendidikan massa dan dokumentasi Yaitu : 1. Die Young 2. Rekaman Briefing tentang " Utang dan kebijakan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan" dalam Board meeting INFID pada tahun 2005 oleh kepala Bappenas Sri mulyani 3. kumpulan aksi (kapal perang jerman, solidaritas burma, jugun ianfu, RUU Penanaman Modal, kenaikan BBM) 4. aid effectiveness, 5. kumpulan dokumentasi (penyelenggaraan International People Forum di Batam th 2006, Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2007, peluncuran laporan masyarakat sipil tentang pencapaian MDGs tahun 2007), 6. Rekam proses penyelenggaraan training riset di Bali dan Bogor,

II. Divisi : Advocacy

A. Lobby Public policy Advocacy:

- Lobby to The National Decision Maker

II.1. Legislative/parliament & political Parties

II.1.1. Civilian Supremacy

- ✓ Lobby to parliament on military budget, military business, and defense system procurement

- ✓ Lobby to parliament for the amendment of Police law dengan FKB DPR RI pada

April 2008 and FPG DPR RI pada June 2008)

- ✓ Lobby to parliament on the implementation of the Integrity Pact and Anti-Bribery Principles
- ✓ Dialog dengan Komisi I penyampaian Syarat, Kriteria dan Tantangan Bagi POLRI dari perspektif masyarakat sipil. Dialog ini dilaksanakan sehubungan dengan akan dilakukannya Uji kelayakan bagi pemilihan KAPOLRI (Kepala Kepolisian RI)



II.1.1. Debt Campaign

- ✓ Dissemination of INFID lobby paper to the parliament: mendistribusikan hasil riset tentang Aspek Hukum Utang Luar Negeri
- ✓ Intensive lobby to factions in the parliamentary for Budget & Debt problem : agar persoalan utang dimuat dalam tanggapan fraksi-fraksi terhadap atas Nota Keuangan dan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah.
- ✓ Intensive lobby to factions in the parliamentary for Bill on Loan And Debt management, sudah dilakukan namun pembahasan RUUPHLN tidak bisa dilakukan oleh parlemen, karena RUUPHLUN belum diserahkan oleh pemerintah

kepada DPR. Pembahasan RUUPHLN tidak bisa dilakukan oleh DPR karena tidak masuk dalam daftar prioritas Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR

- ✓ Round Table Discussion tentang Debt Audit dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Departemen Keuangan, Bappenas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggota DPR dan Pakar Ekonomi, untuk: 1) mendorong BPK dan KPK bekerja sama dalam melakukan audit Utang Luar Negeri, 2) Mendorong BPK agar tidak hanya melakukan audit keuangan, tetapi Dilakukan Audit Kinerja dan investigative (Jika diperlukan). **Round Table dilakukan dua kali yaitu pada Agustus dan September. Hasilnya**, BPK menyepakati akan melakukan Audit kinerja terhadap 60 perjanjian Utang Luar Negeri dan Debt Swap, sebagai langkah awal. Audit akan dilakukan pada Bulan Oktober dan diharapkan dapat dilaporkan ke public sebelum akhir tahun 2008. Sedangkan KPK akan melaporkan hasil temuannya pada awal tahun 2009

II.1.2. **Poverty and MDG**

- ✓ Regular meeting with parliament members on parliamentary oversight on MDGs
- ✓ Rapat /RDPU IKATAN AHLI KESEHATAN – DPRRI, 4 April 2008
- ✓ Lobby Anggota Parlemen untuk Penolakan harga BBM 2008, Mei-Juni 2008
- ✓ Lobby dengan anggota DPR tentang Alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk pengentasan kemiskinan, merespon Rancangan APBN dan nota keuangan Pemerintah.
- ✓ Lobby informal dan Talk show di Radio dengan anggota DPR agar setiap fraksi dalam dokumen pandangan fraksi-fraksi menanggapi Nota Keuangan Negara dan RAPBN memberikan perhatian secara khusus pada: **1)** masalah pengentasan kemiskinan, **2)** Kenaikan BBM dan dampaknya bagi masyarakat, **3)** alokasi anggaran pendidikan 20%, **4)** beban Utang Negara, khususnya Utang Luar Negeri dan problem pembayarannya di tahun 2009 yang akan berdampak pada anggaran pengentasan kemiskinan dan layanan public. **Hasilnya** 6 Fraksi (Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Pelopor Demokrasi (PBPD), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengangkat persoalan kemiskinan, kenaikan BBM, alokasi anggaran pendidikan dan mendorong pemerintah menghentikan utang serta melakukan pengalihan utang (Debt Swap) untuk mengurangi beban pembayaran cicilan pokok dan Bunga utang, dalam tanggapan fraksi terhadap Nota keuangan pemerintah. **Namun sehari setelah Talk Show tersebut**, Menteri keuangan menyatakan kepada media pentingnya pendidikan bagi masyarakat dan politisi agar tidak memandang negartif (alergi) terhadap utang luar negeri.

II.1. Establishing Caucus in The parliament

II.2.1. *Civilian Supremacy*

- ✓ Lobby parliament member to establish caucus parliament on Security, dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Komisi I DPR RI, 6 Maret 2008 membahas tentang pengawasan sektor pertahanan. Juga identifikasi anggota parlemen yang responsif terhadap issue reformasi pertahanan.

II.2.2. *Debt Campaign*

- ✓ Strengthening Caucus of parliament member on Debt (KAPU), dilakukan melalui diskusi informal dalam berbagai kesempatan pertemuan.
- ✓ Strengthening Women Caucus Parliament to discuss Debt problem. Kegiatan ini dilakukan dalam tahap dini yaitu memberikan informasi penting terkait dengan data-data utang.

II.2.3. *Poverty and MDG*

- ✓ Strengthening Women Caucus Parliament to discuss Poverty and MDGs dalam bentuk Fasilitasi workshop gender pro poor budget anggota DPRD dan DPR RI-Perempuan, Wisma DepHAN, Jakarta, 7-9 Maret 2008.
- ✓ Strengthening Caucus Parliament on Population to discuss Poverty and MDGs, kegiatan ini tidak dilakukan, mengingat efektifitas kegiatan caucus tersebut, yang sampai saat ini tidak aktif dalam membahas MDG, dan masih fokus pada masalah kependudukan dan Keluarga Berencana.

II.2. Executive /Government of Indonesia

II.3.1. *Civilian Supremacy*

- ✓ Lobby to GoI on military budget, military business, and defense system procurement dalam bentuk: Pertemuan dengan Asisten Logistik (ASLOG) TNI, membahas tentang Alat Utama Sistem Pertahanan dan pengadaannya, 19-21 Juni 2008
- ✓ Lobby to GoI for the amendment of Police law dilakukan dalam bentuk: Pertemuan dengan Pakar Hankam, 26 Maret 2008
- ✓ Dialog dengan Departemen Pertahanan, pakar pertahanan dan jaringan Security Sector reform untuk Analisis, Kritik dan rekomendasi terhadap Kebijakan Umum Pertahanan
- ✓ Dialog dengan Kepolisian RI dan Jaringan Masyarakat sipil, kritik dan Rekomendasi SKEP (Surat Keputusan Kapolri) untuk percepatan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat.
- ✓ Focus Group Discussion (FGD) antara Departemen Pertahanan, akademisi, NGO dan partnership tentang Anggaran Pertahanan dan Pengadaan Alutsista di Partnership (Agustus)

11.3.2. *Debt Campaign*

- ✓ Dissemination of INFID lobby paper to the GoI
- ✓ Intensive Discussion INFID's Concept on Illegitimate Debt, Odius Debt and result of INFID Researches, dilakukan ditingkat internal INFID dan jaringan terbatas.
- ✓ Intensive Discussion on draft of bill on foreign Loan and Grant, belum dapat dilakukan pada tahun 2008 karena tidak masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- ✓ Intensive Discussion on debt Funded project (aid Effectiveness)
 - Diskusi dengan Bappenas tentang Efektifitas Negosiasi Utang (Februari-Maret 2009)
 - Rapat dengan Bappenas monitoring Pelaksanaan Deklarasi Paris, 19 maret 2008
- ✓ Koordinasi antara INFID, Pemerintah (Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan), UNIFEM dan UNDP untuk memasukkan perspektif gender dalam dokumen akhir hasil pertemuan Aid Effectiveness di Accra (Juli-Agustus dan September)
- ✓ Konsultasi antara delegasi pemerintah dengan Masyarakat sipil dan akademisi untuk intervensi dokumen akhir hasil pertemuan Aid Effectiveness di Accra (Juli)

11.3.3. *Poverty and MDG*

- ✓ Regular meeting with GoI
 - Kontribusi initial report on ECOSOB and UPR di Deplu dan RWI, 21 Januari 2008
 - Diskusi UPR –DEPLU –Hotel Niko, 29 Januari 2008
 - FGD Review UPR –di Komnas perempuan, 19 Maret 2008
 - Follow up driving change dengan Pemda Klaten untuk mengintegrasikan tujuan MDGs dalam dokumen perencanaan Pemerintahan di Daerah Klaten, Februari 2008
 - FDG Review UPR, 24 maret 2008
 - Dialog informal tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan MDG dalam pertemuan Peluncuran HDR “Tackling Corruption Transforming Live” di Istana Negara dan Diskusi HDR di Balai Kartini, 12 juni 2008
 - Workshop dengan pengurus PP Muhammadiyah mengenai Poverty and MDGs, 26 April 2008 di Yogyakarta
- ✓ Intervention on New Policy on Accelerating Poverty Reduction and Job Creation (PNPM- Program Nasional Pemberdayaan masyarakat)
 - Rapat di kantor Menko Kesra, tentang program dan pembiayaan pengentasan kemiskinan, 3 Maret 2008

- Lobby to The International Decision Maker

II.4.1. *Civilian Supremacy*

- ✓ CGI lobby to Europe, US and Japan
- ✓ Lobby to EU for the Policy Paper on Security Sector Budget Mechanism
- ✓ Lobby to ASEAN on the Policy Paper on Security Sector Budget Mechanism
 - Terlibat dalam advokasi ASEAN Charter dan preparation ASEAN People’s Charter
- ✓ Participation in HRC Annual Meeting
 - *Oral intervention International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Under item 3: Interactive dialog with Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Mr. John Ruggie. Delivered by Rafendi Djamin, 4 Juni 2008 (Pernyataan Lisan INFID, Item 3: Dialog Interaktif dengan Perwakilan khusus PBB*

untuk isu Hak Asasi Manusia, Korporasi Lintasnegara dan Kelompok Bisnis)

- *Joint Oral Statement 8th Session of the UN Human Rights Council, Friday, 6 June 2008 - Item 4: Follow-up to the special session on the situation of human rights in Myanmar by Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Ain O Salish Kendra (ASK), Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) and Philippines Human Rights Information Center(PhilRights), delivered by Ms. Yuyun Wahyuningrum. (Pernyataan bersama tentang Keadaan Myanmar)*

II.4.2. Debt Campaign

- ✓ Dissemination of INFID lobby paper to CGI member countries
 - Meeting Aid Effectiveness & visiting D & P in Canada, 1-2 Februari 2008
- ✓ Attend the Annual and Spring Meeting of WB/IMF, tidak dilakukan, sebagai gantinya:
- ✓ Sejak February-juni 2008, Lobby Draft Kebijakan WB untuk Middle income countries dengan assistant Vice Presiden East Asia and Pacific Region, mendorong diselenggarakannya Workshop konsultasi kebijakan World Bank dengan masyarakat sipil (CSO) dari Asia Timur dan Pasifik. Workshop konsultasi telah diselenggarakan pada 18-20 Juni 2008 di Jakarta.
- ✓ Attend the ADB Annual Meeting (2008 in Kyoto), tidak dilaksanakan, namun kritik kebijakan ADB dilakukan di Jakarta.
 - Menyampaikan Position paper kritik safeguard policy ADB. 12 Februari 2008
- ✓ Lobby to Europe, US and Japan
 - Menghadiri konsultasi UN dengan CSO membahas: Avoiding The 2015 Debt Crisis, UN-New York, 31 Mei-2 Juni 2008
- ✓ Lobby visit to Sweden, belum dilaksanakan
- ✓ Attend the FfD+5 Summit
 - Lobby dengan UN dan UNESCAP untuk membahas masalah Utang negara-negara Asia, Regional

meeting for Financing for Development, Philipina, 22 April 2008

- ✓ Participate in World Social Forum
 - Menghadiri pertemuan konsultasi Masyarakat sipil untuk OECD- Accra Meeting di Roma, 10 Mei-15 Mei 2008
- ✓ Lobby visit to Germany, belum dilaksanakan
- ✓ Attend the G8 summit (japan), belum dilaksanakan. Direncanakan akan dilaksanakan pada 5-11 july 2008 di Hokaido, Jepang.
- ✓ Intervensi substansi outcome document OECD meeting (Accra)
- ✓ Intervensi proposal UNCTAD untuk Financing for Development (FfD)
- ✓ Intervensi dalam Komite Ekonomi Sosial dan Budaya (ECOSOC) PBB dalam pembahasan dan penyusunan draft awal Outcome document Doha Meeting, khususnya tentang Odious dan Illegitimate Debt (Presentasi DKM di UN, tentang illegitimate debt di Indonesia)
- ✓ Lobby penghapusan utang tidak sah (kasus Pembelian Kapal Perang bekas Jerman Timur) , lobby ini dilakukan oleh NGO Jerman
- ✓ Seminar illegitimate debt di World Bank, (kasus Pembelian Kapal Perang bekas Jerman Timur), dilakukan oleh EED dan AFRODAD (materi kasus Kapal Perang Jerman Timur) yang diterbitkan oleh AFRODAD adalah hasil kerja sama antara INFID dengan AFRODAD
- ✓ Lobby pada pemerintah Australia agar pemerintah Australia memberikan Debt Swap (Debt 2 Health). Lobby ini dilakukan oleh NGO Australia (Jubilee Australia), dengan menggunakan basis argument hasil penelitian INFID. (Riset Data (Desk Research) tentang Korelasi beban pembayaran Utang yang jatuh tempo pada tahun 2009 - 2015 dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan MDG). Jubilee Australia meminta INFID untuk menulis surat langsung pada pemerintah Australia dan ditindak lanjuti dalam dialog dengan pemerintah Australia dalam pertemuan DOHA

II.4.3. Poverty and MDG

- ✓ Lobby to Creditor/donor

- Pertemuan di kedutaan Belanda membahas tentang MDG di Indonesia, 26 Mei 2008
- ✓ Attend the Spring and Annual Meeting of WB/IMF, tidak dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan Lobby dengan pengambil keputusan dari Washington DC yang hadir di Jakarta
 - Workshop EAP CSO- WB, 18-22 Juni 2008
- ✓ Attend the ADB Annual Meeting (2008 in Kyoto), tidak dilaksanakan, tetapi untuk persiapan lobby dilakukan koordinasi dengan NGO Indonesia yang akan menghadiri pertemuan.
- ✓ Lobby to Europe, US and Japan, Lobby pada pemerintah Jepang dilakukan oleh Nindja di Jepang dan Lobby dengan JBIC dilaksanakan di Jakarta oleh sekretariat INFID
- ✓ Attend the FfD+5 Summit, belum dilaksanakan, direncanakan akan dilaksanakan pada November 2008
- ✓ Attend the Mid-term MDGs achievement Meeting
- ✓ **Lobby using the UN mechanism**
 - INFID Oral intervention - 8th Session UN Human Rights Council 8th Session UN Human Rights Council. Under Item 3: General Debate : **Debt And Extreme Poverty**, June 4th, 2008, Delivered by Rafendi Djamin
 - Mengirimkan Pernyataan Tertulis kepada Dewan HAM:
 - Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right To Development
 - "The Government of Republic of Indonesia has not completely realized the fulfilment of Economy, Social and Cultural Rights in the Effort of Poverty Reduction" Sekretariat INFID, 20 February 2008
 - Status Quo of Human Rights Violation On Indonesian Migrant Workers Abroad, Sekretariat INFID dan Migrant CARE Indonesia , 20 Februari 2008
- ✓ Participate in the World Social Forum
 - Narasumber Seminar World Social Forum tentang "Demokrasi" di Ukraina, 6-9 April 2008
- ✓ Attend the G8 summit (2008 in Japan) belum dilaksanakan. Direncanakan akan dilaksanakan pada 5-11 July 2008 di Hokaido, Jepang.
- ✓ Menjadi icon campaign dalam peringatan 60 tahun deklarasi universal HAM.. bisa dilihat dalam

www.everyhumanhasrights.org dan juga menjadi link di www.googleearth.com

- ✓ Intervensi outcome document OECD agar tujuan utama dari Aid Effectiveness dan Deklarasi Paris adalah untuk mencapai tujuan MDG dan memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan keadilan gender menjadi landasan dalam pelaksanaan Deklarasi Paris.
- ✓ Intervensi terhadap pembahasan- pembahasan di tingkat internasional terkait issue Global Partnership (Goal 8 MDG), krisis pangan dan Energi, Hak Pekerja Migrant

IV.2. Campaign

II.1. Civilian Supremacy

II.1.1. Create Popular Campaign

- ✓ Create campaign materials through website and hard copy on military budget, business, and defense system procurement in English and Bahasa Indonesia
- ✓ Dissemination of campaign materials through website and hard copy on military budget, business, and defense system procurement in English and Bahasa Indonesia.

II.1.2. Media Campaign

- ✓ Media campaign through radio talkshows for the issue of military budget, business and defense system procurement
- ✓ Media campaign through printed articles for the issue of military budget, business and defense system procurement :
 - Proyeksi Penegakan HAM 2008: Ketidakmauan Penegakan HAM Berlanjut. Konferensi Pers Bersama, 3 januari 2008, oleh **Jaringan Demokrasi** : Arus Pelangi, Demos, FSPI, HRWG, Imparsial, Kalyanamitra, LBH-APIK, Praxis, Jaringan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (JSKK), INFID, Jaringan relawan Kemanusiaan (JRK), KontraS, Setara Institute, PBHI, Prakarsa, SHMI, Wahid Institute, YLBHI.
 - Evaluasi Reformasi Sektor Pertahanan, Konferensi Per Bersama, 8 Januari 2008, oleh : Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Imparsial, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) and Human Rights Working Group (HRWG).
 - Evaluasi 10 tahun reformasi bidang Pertahanan dan keamanan (TNI dan Kepolisian)
 - Monitoring dan kampanye penghentian kekerasan oleh militer dan kepolisian di beberapa wilayah bersama jejaring di wilayah
 - Penyampaian statement terkait dengan kebijakan Umum Pertahanan
 - Kritisi terhadap kasus Demonstrasi Anggota Brimob terhadap korupsi yang dilakukan oleh Koperasi milik kepolisian Primkopal di Sulawesi Selatan Barat

- ✓ Media campaign through printed articles for the issue of police law:
 - Deklarasi Maklumat Kebangkitan Nasional, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 28 Januari 2008 . Deklarator yang hadir antara lain, dari berbagai LSM seperti INFID, Human Rights Working Group, ELSAM, dan sejumlah tokoh lainnya. Selain itu, puluhan korban dari kerusakan lingkungan asal Soroako, dan Sidoarjo juga turut menyampaikan orasinya.
 - Korupsi Suharto Harus dibahas dalam Pertemuan Internasional tentang Korupsi dan STAR di Bali 31 Januari 2008 , Pernyataan Pers Bersama INFID dan ICW, 27 Januari 2008
 - Parlemen Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia menuntaskan kasus Munir hingga akhirnya, Pernyataan Pers Bersama tentang Kasus Munir dan Delarasi parlemen Eropa Written Declaration nomor 98/2007 tertanggal 13 Maret 2008. Pada 17 Maret 2008, oleh KASUM dan INFID.
 - Monitoring dan evaluasi pengalihan bisnis militer
- ✓ Media campaign through radio talkshows for the issue of police law,
- ✓ Press Realese Statemant INFID :
 - Vonis Putusan Bebas Muchdi Pr (tersangka pembunuh Munir)
 - Serangan militer Israel kepada Palestina

II.1.3. Seminar & Workshop

- ✓ Seminar on Civilian Police and Community Police
 - Seminar dan Diskusi Publik "Polri & Keamanan Humanis dalam Transisi di Indonesia" di Hotel Ambara, 19 Juni 2008
- ✓ Public education to monitor the implementation of the Integrity Pact and Anti-bribery principles
 - Diskusi Proyeksi Pertahanan, Motivasi Bisnis dan Pengadaan Alutsista, 16 April 2008
 - Kontribusi dalam konferensi Warisan Otoritarian yang diselenggarakan ELSAM untuk kluster peran militer dalam Ekonomi.
- ✓ Work shop to monitor the implementation of the Integrity Pact and Anti-bribery principles kegiatan ini dibatalkan karena Riset Integrity Pact masih dalam proses.

- Workshop tentang Dokumen Kebijakan Umum Pertahanan , untuk merespon kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
- Diskusi Publik “RUU Komponan Cadangan Pertahanan Negara ” diselenggarakan oleh INFID-Imparsial –Hotel Millenium, 27 Mei 2008
- ✓ Workshop on HR in conflict areas (Papua)
 - Dilakukan dalam bentuk rapat Jaringan Update Situasi Papua, 6 maret 2008
- ✓ Workshop on Community Policing (in Sulawesi), kegiatan ini belum dilaksanakan.
- ✓ Monitoring bilateral and multilateral Military Cooperation/Financing
 - FGD ttg Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan kerjasama Pertahanan di IDSPS, 2 April 2008



II.2. Debt Campaign

II.2.1. Create Popular Campaign

- ✓ Create campaign materials through website and hard copy on debt issues in English and Bahasa Indonesia (Ex: Aid Effectiveness)
- ✓ Dissemination of campaign materials through website and hard copy on the structure of Indonesian debt in English and Bahasa Indonesia

II.2.2. Media Campaign

- ✓ Media campaign through radio talkshows on the structure on Indonesia's debt :
 - “Beban Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang tahun 2009-2014 merintangai pencapaian MDG” Radio 68H
 - Bahaya utang, dampak proyek utang terhadap kemiskinan “ talkshow Radio (green Radio selama 5 hari berurut-turut)
- ✓ Media campaign through radio and TV talkshows on illegitimate Debt and Odiuos debt

- Pers Breifing Dampak draft Safeguard policy ADB bagi Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan sebagai Paralel meeting dari Forum konsultasi safeguard policy yang diselenggarakan ADB di Hotel Mulia, Jakarta 12 Februari 2008
- ✓ Media campaign through radio and TV talkshows on Debt Audit
- ✓ Media campaign through movies and printed articles on the structure on Indonesia's debt
 - Berpartisipasi dalam Poeples Tribunal on Soeharto (Pengadilan Rakyat kepada Soeharto) yang diselenggarakan oleh Demos. INFID membawa kasus Pelanggaran HAM berbasis proyek Utang (kesaksian Kedung Ombo) pada bulan Februari dan maret
 - Press realese/konferensi pers,
 - Utang dan dampaknya pada ketahanan Pangan (Global week campaign – Hari Pangan Sedunia)
 - Utang dana talangan untuk mengatasi krisis global dan akibatnya bagi keuangan negara
 - Negara berhutang untuk membela Pemodal (kasus dana utang untuk penyelamatan Perusahaan milik Keluarga Abu Rizal Bakrie
- ✓ Pentingnya Audit Utang Luar Negeri dan penghapusan utang yang tidak sah (illegitimate Debt) –Radio
- ✓ Dampak negative utang (melalui elaborasi beberapa contoh kasus ; utang di sector perkereta apian, utang pengentasan kemiskinan, utang sector irigasi, utang sector pertanian, dll) terhadap perubahan kebijakan nasional dan daerah
- ✓ Kampanye Media : **INDONESIAN WEEK OF ACTION, Against Illegitimate Debt, IFIs and Climate, Change, October 12 - 18, 2008**

II.2.3. Seminar & Workshop

- ✓ Workshop on the structure of Indonesia's debt and on Debt Audit, belum dilakukan, direncanakan pada bulan Agustus.
- ✓ Seminar on the Kecamatan Development Project (KDP) in Kupang, belum dilakukan
- ✓ Roundtable discussion on Debt Swap (Follow up), belum dilakukan
- ✓ Monitoring bilateral and multilateral meetings
 - Workshop Utang dan NeoLiberalisme untuk Mitra DnP, Jakarta 22-25 Mei 2008

- ✓ The Awakening of Indonesia's Economic
 - Memberikan kontribusi materi dalam Konferensi warisan Otoritarian, yang diselenggarakan ELSAM, untuk kluster Ekonomi, Hukum dan utang membahas masalah relasi utang dengan perubahan hukum di Indonesia.
- ✓ Proyek Utang sector air, pertanian dan perubahan Iklim serta dampaknya pada ketahanan pangan Nasional (10-10 Oktober 2008)

II.3. Poverty and MDG

II.3.1. Create Popular Campaign

- ✓ Create campaign materials through website and hard copy on Poverty and MDGs in English and Bahasa Indonesia
 - Pameran Foto dan Kampanye MDG INFID (UNDP) di Museum Bank Mandiri Kota
 - Support Pementasan Teater Sandekala, yang menceritakan tentang korupsi dan dampaknya terhadap kemiskinan. Kegiatan ini diorganisir oleh anggota dan jaringan INFID. Pentas Sandekala diselenggarakan di dua tempat, Jakarta dan Bandung dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Sunda. INFID mensupport pembelian tiket untuk 200 pelajar SMA, untuk menonton pementasan tersebut. Support ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tentang masalah korupsi dan kemiskinan serta memberikan apresiasi pada pengembangan budaya lokal.
 - Dissemination of campaign materials through website and hard copy on poverty and MDGs in English and Bahasa Indonesia
 - Menyambut International Women's Day "Perempuan Indonesia Menuntut Hak Atas Pangan", 8 Maret 2008.
 - Keputusan Kenaikan Harga BBM adalah Politik Pemiskinan Rakyat Indonesia, 7 Mei 2008.
 - Kenaikan Harga BBM Dan Tindakan Represi Aparat adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia - 28 Mei 2008.
 - Tolak kenaikan BBM, Turunkan Harga Sembilan Bahan pokok, Naikkan Upah Buruh industri dan pertanian - 1 Juni 2008 - INFID-FPR.

- Dampak negative kebijakan penghapusan Subsidi, (BBM, Kesehatan, pendidikan, pertanian)
 - Dampak negative liberalisasi perdagangan pangan pokok dan akibatnya pada pencapaian target-target MDG
 - Kurangnya komitmen Negara-negara maju dalam mencapai target MDG Goal 8 (semakin menurunnya jumlah dan kualitas ODA)
 - Dampak negative perjanjian utang dan beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pada pencapaian MDG
 - Desiminasi Lembar Informasi tentang Hak Atas Pangan
- ✓ **Media campaign through radio and TV talkshows on poverty and MDGs in Indonesia**
- Talk Show Radio Trijaya FM: Pencapaian MDG dan kebijakan Harga pangan, Tri Jaya FM, 21 Januari 2008
 - Negara yang Memiskinkan Rakyat- 15 Maret 2008 – Tri Jaya FM-Media Indonesia –Metro TV
 - Talk Show Metro TV : Energi Listrik untuk Rakyat (INFID, LBH JKT, Migrant Care, WALHI, FAKTA), 18 Maret 2008
 - Talk Show ANTV – Perspective, on May Day 2008, 25 April 2008
 - Kebangkitan Nasional Vs Keterpurukan Nasional – 17 Mei 2008 - Tri Jaya FM-Media Indonesia – Metro TV
 - Pemerintah Bekerja Berdasarkan Pesan Sponsor- 30 mei 2008 - *IndoPROGRESS*, Manhattan, New York, AS
- ✓ **Media campaign through printed articles and meeting in local areas on poverty and MDGs in Indonesia**
- Kontribusi artikel MDGs dan Kesehatan di Jurnal PIKUL Maret 2008
 - **Artikel** : Menaikkan Tarif Bukan solusi Tepat, Azaz Tigor Nainggolan –Fakta Mei 2008
 - Kontribusi artikel hak atas pangan di bulletin ASASI ELSAM – Mei 2008
 - **Dialog Publik** "Dampak Kenaikan BBM bagi Rakyat Kecil", Jakarta, YTKI- 15 Mei 2008 :

mengungkap kesaksian ibu Rumah tangga, kelompok Miskin Kota, Pedagangan kecil & Kaki Lima, pengemudi angkutan kota, buruh, Guru, Pelajar dan mahasiswa.

- Support dialog publik tentang dampak kenaikan BBM yang diselenggarakan FPR di 12 Kota, 17-21 Mei 2008
- Karnaval/Aksi damai Tolak kenaikan BBM (INFID-FPR), 21 Mei 2008
- Karnaval/Aksi damai Tolak kenaikan BBM (INFID-FPR), 01 Juni 2008
- Diskusi Peran G8 dalam pencapaian MDG, thema : **Jamuan Makan di Atas Peluh Pemiskinan Global** , Menjelang Pertemuan G8 di Hokaido – Jepang pada 7-9 Juli 2008 , Juni 2008

II.3.2. Seminar & Workshop

- ✓ **Workshop on Japanese and Korean ODA**
 - Persiapan Workshop dampak ODA Jepang di negara-negara Asia dan pacifik, Sapporo Convention Hall pada 6 Juli 2008. INFID mempresentasikan **Laporan Penelitian : KERJA SAMA GLOBAL DALAM PENCAPAIAN MDGs** (Sebuah kajian mengenai kewajiban negara-negara maju dalam pemenuhan Goal 8 MDG) Presentasi dalam Paralel meeting, G8, Juli 2008
- ✓ Dissemination of information on MDGs achievement in Indonesia to Europe, Japan, US-Canada and Australia-NZ, belum dilaksanakan.
- ✓ Monitoring national, bilateral and multilateral meetings
 - Asean Parliamentary meeting in Bangkok, "Peran Parlemen dalam melakukan kontrol terhadap perjanjian dan kerja sama Internasional" April 2008
 - Diskusi Meja Bundar :Krisis Pangan dan dampak kebijakan Global , 30 April 2008
 - Analisis Kemiskinan dan pemiskinan Perempuan – RTD –Kalyanamitra, 24 Juni 2008
 - Partisipasi dalam Seminar Hasil Penelitian Akses & Pemanfaatan Fasilitas Layanan Kesehatan, 30 juni 2008
 - Kontribusi Materi dalam Konferensi Warisan Otoritarian untuk issue Perubahan kebijakan

layanan publik sebagai akibat ikatan perjanjian utang.

- ✓ Workshop Fundamental Ekonomi Indonesia dihadapkan pada Krisis keuangan Global (17 Oktober 2008)
- ✓ Strategic meeting (pertemuan untuk perancangan strategi) Membangun Gerakan masyarakat sipil untuk Gerakan Ekonomi Kerakyatan berbasis budaya (27 Oktober 2008)

I. Main Activity: Networking

III.1. National Networking

III.1.1. Civilian Supremacy

- ✓ Regular meeting for networks to discuss military budget, military business, and defense system procurement
 - Focus Group Discussion tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara di IDSPS , 2 April 2008
- ✓ Regular meeting for networks to discuss Police Law
 - Dilakukan pertemuan regualir, dua bulan sekali dengan jaringan advokasi reformasi kepolisian.
- ✓ Regular meeting for networks to discuss the implementation of integrity pact and anti-bribery principles
 - Diskusi Eksaminasi Putusan Soeharto Vs Time (Networking-SSR-HAM), 17 Januari 2008
- ✓ Training SSR, dilaksanakan pada tanggal 1-5 Desember 2008 bekerja sama dengan Federasi Kontras, Imparsial dan IDPIS
- ✓ Socialitation research result regional budget for military budget and guidenece to ICCPR
 - Advokasi people tribunal untuk Soeharto kerjasama dengan seluruh NGO yang dikoordinir oleh Demos
 - Workshop UU KIP, Jakarta 24 Juni 2008 untuk membahas implementasi article 19, ICCPR.
- ✓ Mendukung advokasi dan statement anggota dan jejaring kerja NGO/Ormas Perempuan dalam menolak pengesahan RUU Pornografi (Oktober 2008)

III.1.2. Debt Campaign

- ✓ Mapping of INFID regional, and national networks and Regular meeting for networks to discuss Debt Problems.
 - Mapping telah dilakukan pada Februari - April, bersamaan dengan update kenggotaan dan jaringan INFID
- ✓ Regular meeting for networks to discuss draft of Bill on Foreign Loan and Grant Management
 - Kegiatan ini belum dapat dilakukan, karena pemerintah belum menjadikan prioritas untuk pembahasan draft RUUPHLN. Ada indikasi keengganan pemerintah dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini, karena berpotensi untuk mengurangi kewenangan pemerintah (Khususnya

- departemen keuangan) dan memperkuat kontrol parlemen terhadap utang luar negeri.
- ✓ Regular meeting for networks to discuss Advocacy Strategy on draft of Bill on Foreign Loan and Grant Management
 - Pertemuan untuk penyusunan Strategy advokasi tentang Safeguard Policy ADB pada 31 Januari, 5 dan 8 Februari
 - Diskusi Strategi Advokasi DAM di WALHI (utang-jaringan), 18 Maret 2008
 - Narasumber dalam Peluncuran Laporan Transparency International di TI (korupsi sektor kesehatan), 26 juni 2008
 - ✓ Fokus pada Audit Utang dan illegitimate Debt, dengan cara:
 - Distribusi hasil riset INFID tentang konsep dan kasus-kasus illegitimate debt di tingkat internasional
 - Terlibat dalam Global campaign Debt and IFIS selama satu minggu
 - ✓ Konsolidasi jejaring kerja Advokasi melawan International Finance Institution (persiapan untuk advokasi Asian development Bank, pertemuan bulanan sejak Agustus 2008)

III.1.3. Poverty and MDG

- ✓ Training researcher for MDGs
 - Training For Researcher-Bali, 15-31 januari 2008
 - Training For Researcher-Bogor, Februari 2008
 - Penelitian di Aceh dan Nias atas Aid Pasca Tsunami, 15 Feb-6 Maret 2008
- ✓ Regular meeting with the MDGs network in Indonesia
 - Dialog Nasional – Pemisakanan , kerja sama INFID - GAPRI, 22 Januari 2008
 - Diskusi Peran LSM dalam Pembangunan, 15 April 2008
 - Konsultasi GMKI "Krisis Ekonomi Global dan kemiskinan di Indonesia"
 - Pertemuan Jaringan MDG Indonesia di Bogor, 19 Juni 2008

III.1. International Networking

III.2.1. Civilian Supremacy

- ✓ Facilitating INFID members for advocacy to UN
 - Dilakukan dengan memfasilitasi anggota dan jaringan INFID yang akan mengikuti Pertemuan Dewan HAM, dengan menggunakan consultative status INFID.
- ✓ Maintaining infid network in Europe and Japan
- ✓ Preparation on Expert Meeting on SSR (military and policy) in Brussels

III.2.1. Debt Campaign

- ✓ Mapping of INFID international, regional networks
 - Pertemuan Bangkok dalam rangka NGO National Platform yang menginformasikan kegiatan2 strategis dari April sampai September, 24-29 Februari 2008
- ✓ Participate in network meetings in Europe, belum dilaksanakan. Direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2008
- ✓ Participate in Eurodad/ROA annual meeting, belum dilaksanakan, direncanakan untuk menghadiri Strategic Meeting Reality Of Aid, Philipine, 14-15 July
- ✓ Participate in the annual meeting of NGO Forum on ADB
 - Strategic meeting untuk merespon ADB annual meeting di Bali 2009. di Jakarta, Juni 2008
- ✓ Maintaining Infid network in Europe dilakukan melalui komunikasi elektronik dan pertemuan di berbagai event yang diselenggarakan di Eropa dan UN
- ✓ Maintaining Infid network in Japan dilakukan oleh Nindja dan sekretariat INFID melalui pertemuan di Jepang dan pertemuan di event-event di tingkat regional yang diselenggarakan di asia dan Indonesia
- ✓ Participate in the OECD Meeting parisipasi berbagai pertemuan konsultasi dan seminar yang diselenggarakan di Asia, Canada, Paris and Ghana.

III.2.2. Poverty and MDG

- ✓ Participate in the annual meeting of NGO Forum on ADB on Poverty & MDGs Issues tidak dilakukan, sebagai gantinya dilakukan advokasi Safeguard policy di Indonesia dan Rapat dengan NGO Forum on ADB yang diselenggarakan di Jakarta dan persiapan magang staff

INFID di NGO Forum on ADB yang dilakukan pada bulan July-Agustus.

- ✓ Participate in Eurodad annual meeting on Poverty & MDGs Issues, belum dilakukan
- ✓ Participate in network meetings in Europe, Australia dilakukan saat melakukan advokasi dan menghadiri pertemuan di Eropa dan Australia.
- ✓ Participate in GCAP regional meeting belum dilakukan, namun koordinasi networking dilakukan melalui komunikasi dan kunjungan GCAP Indonesia ke Philipina dan sebaliknya kunjungan GCAP Asia ke Indonesia pada Agustus, dan kampanye bersama tingkat Asia pada Oktober dan Desember 2008
- ✓ Participate in GCAP international meeting belum dilakukan, karena belum ada pertemuan GCAP Internasional
- ✓ Annual meeting of INFID networks in Europe, belum dilakukan
- ✓ Facilitating INFID members for advocacy to UN and UNESCAP dilakukan pada bulan Maret dan Juni pada saat ada pertemuan UN

III.1. **Information Exchange**

III.3.3. **Civilian Supremacy**

- ✓ Information exchange on the development of SSR & ICCPR Seminar Nasional Konsolidasi Politik Perempuan, 16 Januari 2008
Wahyu Susilo mengunjungi Dept of State US, Dept of Labor and Dept of Justice US untuk berkampanye tentang trafficking, Kebebasan beragama dan kasus Munir (dalam program International Visitor of Leadership) – Mei 2008
- ✓ Visit to INFID members in the regions dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota INFID dan jaringan

III.3.4. **Debt Campaign**

- ✓ Annual meeting of INFID networks in Europe, belum dilakukan, direncanakan dilakukan pada bulan Oktober
- ✓ Visit to INFID members in the regions, belum dilakukan direncanakan pertemuan disesuaikan dengan undangan-undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota dan jaringan INFID
- ✓ Information exchange on the development of debt Advocacy

- Rapat dengan Oxfam (Oxfam Novib, Oxfam GB, Oxfam Hongkong, Oxfam Australia, Oxfam Internasional) Sharing Pengalaman (Walhi, INFID, Alfa Omega) dalam melakukan kerja-kerja Advokasi
- Worksop dengan mitra anggota DnP tentang bahaya Utang dan Globalisasi pada bulan Mei.

III.3.1. **Poverty and MDG**

- ✓ Maintaining Infid Poverty and MDGs network in Europe, US, Australia dilakukan bersama dengan kunjungan staff INFID dalam melakukan kegiatan dinegara tersebut.
- ✓ Visit to INFID members in the regions
 - Fasilitasi anggota dalam pelaksanaan training advokasi YPHA kerja sama dengan WVI tentang Hak Anak dan MDG di Ternate, Februari 2008
 - Fasilitasi Anggota INFID (YPHA) kerja sama dengan WVI Training Advokasi Hak Anak dan MDG di Aceh, 1-3 April 2008
 - Fasilitasi YPHA kerja sama dengan WVI training Advokasi Hak Anak dan MDG di Papua, 15-17 April 2008
- ✓ Maintaining Infid network in Japan (MDGs Networks)
- ✓ Bersama GCAP Indonesia dan GCAP internasional mengkampanyekan tanggung jawab Negara dalam mencapai MDG pada peringatan hari-hari internasional dan event –event internasional seperti : G8 meeting, MDG High Level Event-UN, International Food Day dan Poverty Day

I. Institutional Development

IV.1. Institusional

IV.1.1. Legality and Policy Development

Hasil keputusan Extra General Assembly Meeting pada tanggal 27 November 2006, telah mengesahkan Yayasan INFID berubah menjadi bentuk Perkumpulan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INFID telah disahkan dalam Extra General Assembly telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

Pada tanggal 14 Mei 2007, akte notaries perkumpulan INFID dikeluarkan dengan susunan pendiri pengurus Perkumpulan yaitu : Ketua : Poengky Indarti, Wakil Ketua : Titus Odong Kusumajati, Bendahara : Azas Tigor Nainggolan, Sekretaris : Rizal Malik. Dokumen lainnya yang telah selesai pada tanggal 9 Juni 2007 yaitu : Izin Domisili, Nomor NPWP Perkumpulan INFID.

Dokumen yang masih dalam proses pengurusan adalah pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM serta akte Perkumpulan INFID terdaftar dalam Berita Negara RI. Proses ini akan memakan waktu 6 bulan ke depan terhitung mulai bulan Juni 2007. Setelah semua dokumen lengkap menurut sahnya dokumen sesuai hukum Indonesia maka proses selanjutnya adalah penertiban dokumen INFID yang sah dalam administrasi keuangan di beberapa bank INFID. Sampai saat ini salah satu ketentuan persyaratan yang belum dipenuhi oleh INFID selaku nasabah di beberapa bank adalah belum adanya atau masih diprosesnya akte notaris yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham.

Paket pengurusan dokumen Perkumpulan INFID melalui notaries Nurul Larasati adalah Rp 5.000.000,- . Biaya Paket dokumen adalah Akte Notaris, Izin Domisili Perkumpulan INFID, NPWP Perkumpulan, Pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham dan tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada Oktober 2007 dari Dep. Hukum & Ham mengirim surat tertulis, meminta agar Perkumpulan INFID merubah

redaksi beberapa pasal dalam akte notaries sehingga pengajuan permohonan kembali lagi dari awal.

Perubahan dalam akte notaries sesuai dengan permintaan surat tertulis dari Departemen Hukum & HAM **telah didiskusikan dalam General Assembly Meeting pada tanggal 29 - 30 Oktober 2008. Selanjutnya sekretariat INFID akan mengajukan revisi akte kepada Dep. Hukum & HAM dengan status pengajuan adalah permohonan awal.**

IV.1.2. Fund Rising/Resource Mobilization

Tahun 2008, beberapa funding INFID ada yang masih mendanai program INFID sebagai kelanjutan komitmen tahun sebelumnya yaitu :

- ✓ **Oxfam Australia** (Bantuan diberikan untuk pelaksanaan Conference) Sieneke Martin tidak bekerja lagi di Oxfam Australia dan penggantinya adalah Natalie Purcell, Program Officer, East Asia. Oxfam Australia juga mempunyai kantor di Bali dengan contact person : Bpk. Priyo Budi Asmoro, Program Partners Coordinator Indonesia
- ✓ **Development & Peace Canada untuk periode 2008 dan 2009**
- ✓ **Ford Foundation** (Bantuan diberikan di tahun 2005 dan penggunaan dana sampai Juli tahun 2009)
- ✓ **Oxfam Novib untuk periode 2007 hingga 2009**
- ✓ Trocaire : (bantuan diberikan khusus untuk pelaksanaan conference)
- ✓ Bernard van Leer (program khusus riset Gizi dan Pendidikan Usia Dini dilakukan oleh INFID beserta anggotanya Yayasan Pemantau Hak Anak

Dalam usaha fundrising kepada donatur, INFID juga telah mengajukan 3 proposal : "*European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-based Support Scheme (CBSS) Indonesia*" dan "*Non-State Actors & Local Authorities in Development – Actions in Indonesia*" Proposal diajukan kepada European Commission (EU), Jakarta tetapi belum hasil. Selain itu Pengajuan Proposal kepada Tifa Foundation untuk mendukung conference,

namun hingga conference dilaksanakan, proses pembahasan di internal Tifa belum selesai.

Lobby dengan Development and peace untuk mendapatkan perjanjian kesepakatan dukungan program hingga tahun 2009.

Disamping itu masih dijajaki bantuan pendanaan dari sesama NGO yang melakukan advokasi di Amerika dan Eropa

IV.1. Planning, Monitoring & Evaluation

IV.2.1. Quaterly PME :

- ✓ PME-1 : Jan – Maret 2008 : Pelaksanaan diadakan pada tanggal 1 Mei 2008 di sekretariat INFID untuk melihat kemajuan program dan kemajuan pencarian dana
- ✓ PME-2 (April – Juni 2008) : telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2008 di INFID konsolidasi budget dan persiapan perhitungan anggaran INFID Conference 2008.
- ✓ PME-3 (Juli 2008 – September 2008) : tidak diadakan mengingat sekretariat mempersiapkan INFID Conference & General Assembly Meeting. Kegiatan rapat di bulan Agustus dan September sampai Awal Oktober 2008 adalah koordinasi persiapan INFID Conference dan General Assembly Meeting 2008 yang diadakan pertengahan Oktober 2008.
- ✓ PME-4 (Oktober 2008 – Desember 2008) diadakan bertepatan dengan Annual Planning INFID 2008 dan diadakan pada tanggal 16 – 20 Desember 2008 di Wisma Arga Mulya, Cisarua, Bogor.

IV.2.2. Internal Audit.

Pelaksanaannya Audit internal dilakukan dalam rangka melakukan strategi pengelolaan dana (cash management) pada rekening INFID. Pelaksanaan audit, hampir sama dengan audit dengan auditor public.

SOP keuangan perlu dilihat kembali (review) mengingat SOP keuangan disahkan tahun 2000.

IV.2.3. Annual Evaluation & Planning

Kegiatan ini akan dilakukan pada awal bulan Desember 2008 sebagai Evaluasi Program tahun 2008 dan Perencanaan Program tahun 2009. Kegiatan ini akan melibatkan board eksekutif INFID, kehadiran beberapa anggota INFID, jaringan INFID, fasilitator serta selektive nara sumber. Pelaksanaan diadakan di luar kantor INFID selama 1 minggu diadakan bertepatan dengan Annual Planning INFID 2008 dan diadakan pada tanggal 16 – 20 Desember 2008 di Wisma Arga Mulya, Cisarua, Bogor. Sebelum kegiatan Annual Planning diadakan pula rapat untuk board periode 2005 – 2008 dan board periode 2008 – 2011 pada tanggal 15 – 16 Oktober 2008.

INFID telah bekerjasama dengan Bpk Wiladi Budharga fasilitator SCN yang telah 2 tahun berturut-turut memfasilitasi Annual Planning INFID. Selain melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program tahun berjalan dan perencanaan untuk tahun yang akan datang, dilakukan juga evaluasi pengembangan kelembagaan dengan menggunakan kerangka Institutional Development Framework (IDF) yang dikembangkan oleh SCN bersama Development and Peace bersama seluruh partnernya.

Staff INFID menyambut baik fasilitasi yang diajukan oleh team SCN mengingat staff cepat mengerti akan materi yang diberikan oleh team SCN. Fee fasilitator didanai oleh funding INFID yaitu D & P

IV.2.4. External Audit (Financial Audit.)

Auditor Publik INFID tahun 2008 bukan lagi Auditor Edi Kaslim yang telah menjadi auditor INFID selama 11 tahun berturut-turut. Tahun 2008 Auditor INFID adalah : **Dra. Eka Masni** Pilihan terhadap auditor public tsb disesuaikan dengan kemampuan keuangan INFID dan juga auditor tsb pernah audit di beberapa NGO seperti YLBHI.. Laporan Auditor telah selesai pada awal bulan Juni 2008

IV.2. Public Accountability (Financial & Narrative Report)

Laporan tahunan yaitu untuk tahun 2007 telah selesai dibuat dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris,

dikirimkan ke donor dan beberapa relasi kerja jaringan. Board menyarankan selain ada Full report, dibuat laporan dalam versi pendek dan Laporan Neraca keuangan untuk memudahkan anggota membacanya. Saran Board sudah dilakukan dan laporan tersebut juga sudah dilaporkan dalam General Assembly Meeting tanggal 29 – 30 Oktober 2008.

IV.1. Corporate Management Information System (MIS) & Members Services :

IV.5.1. Institutional Popularization (institutional brochures, souvenirs,etc)

Produk mempublikasikan dan memperkenalkan INFID berupa, paket gantungan kunci logo INFID dan paket kotak jam meja logo INFID sudah dilakukan dan stok paket gantungan kunci masih tersedia. Produk tersebut hanya diberikan kepada narasumber dalam seminar INFID dan diberikan kepada calon mantan staff INFID serta anggota Board INFID.

Produk lainnya berupa brochure dan produk barang lainnya diproduksi sesuai dengan kegiatan program INFID dan juga berdasarkan permintaan koordinator project INFID. Pembuatan profil INFID dalam 2 bahasa yaitu Inggris dan Indonesia masih dalam tahap penulisan dan desain tata letak, ada beberapa revisi yang harus dilakukan berkenaan dengan profil INFID pasca CGI bubar dan members internasional yang belum sepenuhnya terdaftar kembali sebagai members INFID. Direncanakan akan ada 2 Versi (Indonesia & Inggris).

Dalam INFID Conference dan Genral Assembly Meeting bln Oktober 2008, peserta telah diberikan souvenir berupa tas dengan logo INFID.

IV.5.2. Bridging Communication among INFID members & Secretariat

Proses up-date keberadaan anggota INFID beserta mapping area kegiatan/concern anggota INFID tetap berjalan hingga saat ini. Pelaksanaan up-date tahun 2008 mengenai survey anggota sudah dilakukan oleh

Information & Documentation Officer Sdri. Nikmah yang disambut baik oleh anggota INFID.

Komunikasi dilakukan antara lain dengan menggunakan milis anggota INFID dan milis anggota INFID yang telah mengikuti training untuk peneliti.

Proses komunikasi sekretariat INFID beserta anggotanya tidak selalu intensif. Dilakukan pada saat sekretariat INFID mengirimkan dokumen, newsletter, statement, dan permintaan data untuk pembaharuan database anggota. Selama ini tidak komplain kecuali anggota board yang selalu meminta laporan kegiatan INFID (secretariat update) yang harus diberikan secara intensif kepada mereka selaku board INFID. Pelayanan response terhadap komplain, pertanyaan oleh anggota Board selama ini dilakukan oleh Direktur Eksekutif INFID.

Dalam INFID Conference & General Assembly Meeting bln Oktober 2008, anggota INFID menyatakan senang dengan pengiriman berita-berita dari Information & Documentation Officer INFID yaitu dari Nikmah.

IV.5.3. Facilitate INFID's Member

- ✓ Fasilitasi kepada anggota INFID bisa berupa kerjasama mengadakan suatu workshop/seminar berkenaan dengan issue yang sama dalam menjalankan programnya bersama-sama. Fasilitasi juga bisa berupa support dana saja mengingat anggota atau jaringan sudah dinilai INFID mandiri dalam menjalankan advokasi programnya.
- ✓ Dari pos budget ini maka support dana sebagai solidaritas INFID diberikan kepada : DPP Gabungan Serikat Buruh Independen yang memperjuangkan/menuntut hak pekerja sekitar 1070 orang yang masih dianggap buruh kontrak, buruh cuti melahirkan 3 bulan tidak dibayar, advokasi utk PHK 107 buruh
- ✓ Fasilitasi kepada anggota INFID juga diberikan kepada wakil ketua board INFID yaitu Titus Odong Kusumajati dan anggota INFID dari IDEA Yoyga yang diwakili oleh Sdri. Valentina Sri Wijiyati yang mengikuti Training Debt Audit yang diorganisir oleh Jubilee South. Training

diadakan tanggal 26 Maret s/d 7 April 2008 di Manila, Philippine.

- ✓ Kehadiran anggota board dan anggota INFID dalam acara ini adalah sebagai langkah INFID memberikan sikap politisnya terhadap utang luar negeri kepada jaringannya di Asia.
- ✓ Pada tanggal 19 Juni 2008 s/d 1 Juli 2008, INFID memfasilitasi persiapan salah seorang anggota Board atau anggota INFID dari Koalisi NGO HAM Aceh yaitu : Faisal Hadi yang diundang oleh International Alert untuk menghadiri Netherlands Specialization Course (Level 5) Reintegration of Ex- Combatants di Landgraaf, Netherlands.
- ✓ Pada tanggal 12 - 14 Juli 2008, Wakil Ketua Board INFID : Titus Odong Kusumajati menghadiri : INFID's delegate to Climate Justice Conference di Bangkok yang diadakan tanggal 12 - 14 Juli 2008. Kegiatan diadakan di Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Yang diorganisir oleh Jubilee South.
- ✓ Pada tanggal 11 November 2008, INFID memberikan dukungan dana untuk korban Lumpur Lapindo dari Jawa Timur sebanyak 150 orang yang akan melakukan dialog dengan anggota parlemen dan pemerintah. Korban Lapindo menginap di YLBHI dan untuk kebutuhan makan dan minum didukung oleh masyarakat sipil termasuk INFID.
- ✓ Fasilitasi jejaring INFID : Fasilitasi Demos dalam bentuk penyediaan fasilitator penyelenggaraan pelatihan untuk Partai Politik Lokal Aceh
- ✓ Fasilitasi anggota INFID : Koalisi Perempuan Indonesia dalam penyelenggaraan Ulang Tahun ke 10 pada 17 Desember 2008
- ✓ Fasilitasi anggota INFID : Fasilitasi Koalisi Perempuan dalam bentuk penyediaan fasilitator untuk kegiatan training strategi pemenangan calon anggota legislative perempuan (Desember 2008)

IV.2. Organizational Meetings

IV.5.1. Secretariat Meeting (Management team meeting, All Staff Meeting, Division Meeting)

IV.5.2. Weekly & Monthly Meeting

Dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2008, rapat secara formal yang tercatat dan tersedianya notulen rapat yaitu :

- ✓ Rapat Review Workplan 2008 diadakan tanggal 7 Januari 2008
- ✓ Rapat Internal tgl 24 Januari 2008
- ✓ Rapat Management : rapat koordinasi antara Direktur dan Deputi tidak ada notulen tetapi hal ini selalu dilakukan
- ✓ tgl 13 Januari 2008, rapat persiapan untuk teknis dan logistik pelaksanaan Training Peneliti di Bali
- ✓ Tanggal 2 Februari 2008 : rapat persiapan pelaksanaan Training Peneliti di Bogor, Hotel Pramesthi
- ✓ Tanggal 21 Agustus 2008 : rapat persiapan untuk sinkronisasi jadwal September – Oktober 2008
- ✓ -Rapat-rapat khusus untuk persiapan pelaksanaan Conference dan General Assembly
- ✓ Rapat seluruh staff INFID dilakukan sebanyak 7 kali yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus dan September 2008
- ✓ Rapat Divisi berdasarkan persiapan kegiatan project INFID. misalkan rapat persiapan training Researcher di Bali dan di Bogor, rapat persiapan press conference, rapat persiapan seminar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan rapat persiapan advokasi utang kapal perang Jerman.

IV.5.3. Board Meeting

✓ Executive Board Meeting:

Januari – September 2008, rapat board eksekutif meeting tidak dihadiri secara lengkap dan tidak secara formal tetapi langsung difasilitasi oleh Ketua Board ibu Poengky Indarti. Komunikasi juga dilakukan per telepon mengingat eksekutif board mempunyai tugas dan jadwal tetap dengan lembaganya sendiri.

✓ Indonesian Board Meeting

Indonesian Board Meeting diadakan pada tanggal 8 – 9 April 2008, di hotel Santika Jakarta dihadiri oleh seluruh anggota Indonesian Board.

Rapat tsb sebagai langkah awal untuk persiapan INFIDConference bulan Oktober 2008. Beberapa pembahasan yaitu TOR INFID Conference , fundrising dan strategy advokasi INFID tahun 2008

✓ **Full Board Meeting**

Full Board Meeting diadakan pada April 2008 dan Oktober 2008 bersamaan dengan pelaksanaan INFID Conference dan General Assembly Meeting tanggal 27 – 30 Oktober 2008.

IV.5.4. Forum

INFID Forum telah diadakan pada bln Oktober 2007. Biasanya INFID Forum tidak diadakan dalam tahun yang sama karena akan diadakan INFID Conference dan GAM bln Oktober 2008.

✓ **Conference and General Assembly;**

Kegiatan ini telah diadakan pada tanggal 27 – 30 Oktober 2008. Hasil dari kegiatan tsb yaitu dari komisi II : Program dan strategi INFID periode 2008 - 2011 dan komisi III : Kelembagaan INFID akan dimasukkan dalam program kerja INFID tahun 2009 – 2011.

IV.3. Acquisition & Maintenance of Office Equipment :

IV.6.3. Equipment Procurement

Dilakukan pembelian peralatan sesuai kebutuhan advokasi dan kebutuhan penunjuang kegiatan rutin.

IV.6.4. **Pembelian barang-barang terkait dengan kerja advokasi :** Digital Voice Recorder, LCD Panasonic, Computer (PC) dan Note Book , Cooling Pad Laptop, Super Stack III 10/100 Switch 24 port untuk peralatan server, Anti Virus for Mail server Mdaemon, Anti Virus NORTON (Symantec), Symantec End Point Protection 11.0 dan Anti virus untuk Client & Server, Memory + DVDRW , 5 buah memory VGEN DDR 1 GIGA PC-32005 pcs VGEN SDRAM 512MB PC-133, 1 unit Samsung DVD

IV.6.5. **Pembelian barang perkantoran :** Air Condition (AC) dan Mesin Penghancur kertas

Pada tanggal 11 Desember 2008, INFID mendapat tambahan inventaris yaitu 1 unit TV : LCD 32" merk LG. Pemberian TV tsb adalah hadiah dari bank dimana INFID menjadi salah satu nasabah mereka.

IV.6.6. Maintenance of office equipment

Selama ini untuk proses pemeliharaan peralatan INFID selalu ada koordinasi dengan IT Specialist dan unit Admin. untuk Routine check & maintenance dan maintenance base on cases.

IV.4. Human Resource Development :

IV.7.3. Recruitment Staff

Setelah proses recruitment yaitu test tertulis dilakukan bulan November 2007 dan dilanjutkan dengan test interview oleh Ibu Wustari Konsultan Psikologi dan interview test oleh Board INFID : Azas Tigor Nainggolan , Don K. Marut dan Dian K. Sari tanggal 11 Januari 2008, maka, terhitung April 2008 Sdri. Lia Nurparida telah bergabung dengan INFID sebagai MDG's Advocacy Officer.

Masih ada beberapa posisi yang masih diperlukan (recruit) yaitu : P.O Debt/Coordinator Debt

IV.7.4. Replacement & Staff Evaluation

Terhitung bulan Januari 2008 staff Admin yaitu Jackson Robinson diorientasikan untuk masuk /diarahkan untuk masuk dalam staff program. Pada bulan April 2008 telah menjadi salah satu staf program/assistant Program Officer MDG's

Staff Evaluation belum dijalankan mengingat tool standard belum diterapkan.

IV.7.5. Capacity Building (Strategy, Course & Internship)

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui dua strategi, yaitu 1) Training bagi staff dan 2) Supervisi dan mentor.

Supervisi dan Mentor diberlakukan bagi staf yang masih baru dan staff yang menduduki posisi baru karena mutasi. Bentuk kegiatan supervisi dan mentor adalah pembelajaran untuk: pencarian data dan informasi cara menggunakannya melalui analisis, pembuatan Kerangka Acuan dan komunikasi dengan jaringan.

Antara bulan Januari s/d Desember 2008, staff INFID yang mengikuti training yaitu :

- ✓ Sri Mulyaningsih English Course (Finance) : Elementary + {practical Grammar + Conversation + Intermediate + English for business + Vocabulary + Advance) ; Duration - 100 hrs by phone + 40 sessions personal tution@25mins. ; 14 bulan
- ✓ Nawawi Bahrudin (Coordinator Riset, Tim advokasi SSR): Elementary + {practical Grammar + Conversation + Intermediate + English for business + Vocabulary + Advance) ; Duration - 100 hrs by phone + 40 sessions personal tution@25mins. ; 14 bulan
- ✓ Suwarna (IT) : Kursus Paket Super Intensif Linux Profesional 120 jam : Linux Fundamental, Shell Programming, Linux Sys. Admin., Linux Network & Security
- ✓ Siti Khoirun Ni'mah Training Course on Debt & Debt Audits Manila, Philipine 26 Maret - 7 April 2008
- ✓ Nawawi Bahrudin Course of the Asian Regional Learning Program on Budget Analysis and Economic, Social and Cultural (ESC) Rights Chiang Mai, Thailand, 18 - 30 April 2008
- ✓ Siti Khoirun Ni'mah mengikuti The Diplomacy Training Program's 18'th Annual Human Rights and Peoples Diplomacy Training Program di Sydney, New South Wales, Canberra, ACT, Australia dari tanggal 22 November 2008 - 13 Desember 2008. Nikmah mendapat shcolarship dari Diplomacy Training Program dan merupakan salah satu peserta dari Indonesia yang lulus seleksi untuk mendapatkan scholarship. Peserta lainnya adalah dari Kontras.

IV.7.6. Supervisi dan mentor :

Jeckson Robinson dan Lia Nur Farida

IV.7.7. Volunteer

Direkrut tenaga volunteer utk membantu project INFID a.l: untuk kegiatan Conference dan General Assembly Meeting 2008. Volunteer INFID tsb adalah Wiwit Siswarini yang sebelumnya pernah bekerja sebagai Information & Documentation INFID. Kontrak kerja Wiwit adalah dari tanggal 1 September 2008 s/d 31 Desember 2008. Deputy Executive Director telah membuat **Pedoman Magang** untuk penerapannya di secretariat INFID.

Tidak ada tenaga magang tetapi INFID merekrut seorang volunteer

IV.7.8. Personnel Cost Program & Coordinator

Operational cost routine kecuali L.O Staff Brussels sudah tidak ada kantor di tutup bulan November 2007.

IV.5. Administration General Service

IV.8.3. Office Rent

Perpanjangan kontrak rumah/kantor di Mampang Prapatan XI no. 23, telah dilakukan INFID dengan pemilik rumah pada tanggal 20 Mei 2008. Periode kontrak rumah adalah : 20 Mei 2008 – 19 Mei 2008. Surat perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua pihak. Pada tanggal 20 Mei 2008 pembayaran tahap pertama telah dilakukan dan pelunasan/pembayaran tahap kedua sudah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008. Perlu diketahui bahwa Biaya sewa pertahun adalah Rp 90.000.000,-

IV.8.4. LAIN-LAIN :

Ada pengajuan pengeluaran di bulan Desember 2008 dari IT INFID mengenai Co-location Server for Mirroring Website INFID di US utk 12 bulan @ Rp 2.350.000 = Rp 28.200.000,- dan Rp 3.950.000 utk re-registration domain www.infid.org, re-registration www.infid.or.id, hosting service : period 2008 – 2009, Space : 5 GB, Web Managment.